



LAPORAN TENGAH TAHUNAN 1983 / 1984

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I.21

Direktorat
Kebudayaan

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. CILACAP NO. 4 - TELP. 341799 - 348473 - 341747
JAKARTA PUSAT

OP. 053

353.722

LAP



LAPORAN TENGAH TAHUNAN 1983 / 1984

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. CILACAP NO. 4 - TELP. 341799 - 348473 - 341747
JAKARTA PUSAT

PENGANTAR

Laporan Tengah Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1983/1984 merupakan suatu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 19 Januari 1983 Nomor 050/0/1983.

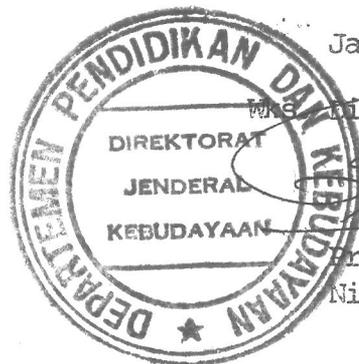
Keputusan Menteri tersebut mempunyai tujuan agar laporan tidak hanya dimaksudkan untuk dapat dinilai, guna perumusan kebijaksanaan tetapi dimaksudkan lebih dari itu, yaitu agar mampu pula sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi guna melaksanakan penyusunan perencanaan lebih lanjut.

Disamping itu, laporan tengah tahunan 1983/1984 disusun dalam masa berakhirnya Repelita III dan menginjak tahap berikutnya yaitu Repelita IV. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan landasan operasional, bidang kebudayaan mendapatkan penekanan-penekanan yang cukup berarti. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan diharapkan sebagai media untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dalam hubungan ini laporan tengah tahunan 1983/1984 mempunyai arti sebagai pemberi informasi dasar yang diperlukan guna mengacu kepada perumusan kebijaksanaan dalam Repelita IV sebagai perwujudan pembinaan dan pengembangan kebudayaan seperti yang diharapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut.

Perlu dikemukakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 19 Januari 1983 Nomor 050/0/1983 laporan Direktorat Jenderal Kebudayaan seharusnya disusun berdasarkan masukan dari laporan tengah tahunan kantor wilayah di propinsi, pasal 5 dihubungkan pasal 6. Dalam hal laporan tengah tahunan 1983/1984, masukan dari kantor wilayah belum terlaksana.

Kepada semua pihak yang memungkinkan laporan tengah tahunan ini dapat disusun, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Oktober 1983.



Wakil Direktur Jenderal Kebudayaan,

Prof. Dr. W.P. Napitupulu

Nip.: 160011342

DAFTAR ISI

PENGANTAR		
DAFTAR ISI	i	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. DASAR	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
	C. RUANG LINGKUP	2
BAB II	PELAKSANAAN RENCANA DAN PROGRAM	
	A. PROGRAM RUTIN	3
	1. Hasil yang dicapai	4
	2. Hambatan dan usaha penanggulangan	26
	B. PROGRAM PEMBANGUNAN	33
	1. Hasil yang dicapai	33
	2. Hambatan dan usaha penanggulangan	39
BAB III	KEADAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KETENAGAAN, PERLENGKAPAN, ANGGARAN DAN LAIN-LAIN	
	A. Organisasi dan Tata Laksana	43
	B. Ketenagaan	57
	C. Perlengkapan	70
	D. Anggaran	76
	E. Lain-lain	87
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran-saran	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Laporan Tengah Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Januari 1983 No.050/0/1983.

Materi laporan disusun berdasarkan hasil-hasil kegiatan yang dicapai dalam melaksanakan rencana dan program baik rutin maupun pembangunan, sesuai dengan Program Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1983/1984. Program Kerja itu merupakan penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan lain yang dalam pelaksanaannya dapat didukung oleh kemampuan dana Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No.0222e/0/1980.

Hasil kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas adalah merupakan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan organisasi dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini Direktorat-direktorat, Pusat-pusat (yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal) serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam kurun waktu bulan April 1983 sampai dengan bulan September 1983.

Di samping itu Laporan Tengah Tahunan ini disusun juga atas dasar masukan Laporan Tengah Tahunan dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Tengah Tahunan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban tentang pelaksanaan rencana dan program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup hasil-hasil yang dicapai, hambatan dan usaha penanggulangan, gambaran keadaan organisasi dan tata laksana, ketenagaan, perlengkapan serta anggaran.

Dengan adanya gambaran secara umum tentang pelaksanaan rencana dan program pada pertengahan tahun tersebut dapat memberikan masukan bagi Pimpinan

Departemen sebagai bahan penyusunan perumutan kebijaksanaan secara menyeluruh dalam menyelesaikan sasaran rencana dan program secara tepat waktu, tepat guna dan berdaya guna.

C. RUANG LINGKUP

Untuk dapat mencapai hasil seperti yang digambarkan dalam maksud dan tujuan tersebut di atas, maka laporan Tengah Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Gambaran tentang hasil pelaksanaan rencana dan program sesuai dengan tugas dan fungsi serta gambaran tentang hambatan dan usaha-usaha penanggulangannya baik anggaran rutin maupun pembangunan.
2. Gambaran keadaan organisasi dan tata laksana, ketenagaan, perlengkapan, anggaran dan kegiatan-kegiatan lainnya yang didukung oleh anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan.
3. Kesimpulan dan saran-saran atas gambaran keadaan seperti tersebut pada butir 1 dan 2 di atas.
4. Pelengkap dari gambaran di atas yang berupa lampiran-lampiran.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA DAN PROGRAM

Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan berdasarkan sumber dananya, didukung oleh program kegiatan rutin dan program kegiatan pembangunan.

Program kegiatan rutin meliputi:

1. Program Pendidikan Aparatur Pemerintah;
2. Program Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Program Penelitian Aparatur Pemerintah.

Sedangkan program kegiatan pembangunan meliputi:

1. Program Kepurbakalaan, Kesenjaraan dan Permuseuman;
2. Program Pengembangan Seni Budaya;
3. Program Kebahasaan, Kesastraan, Perbukuan dan Perustakaan;
4. Program Inventarisasi Kebudayaan;
5. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

A. Program Rutin

Sasaran utama dari ketiga program rutin tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Aparatur Pemerintah.

Sasaran utama program ini adalah meningkatkan keterampilan, pengetahuan dalam bidang teknis dan administratif serta sikap mental dalam menunaikan tugas operasional.

- b. Program Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Program ini mengarah pada pembinaan dan pengembangan segala aspek kebudayaan nasional serta pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional dan kesatuan bangsa serta pembinaan budi luhur.

c. Program Penelitian Aparatur Pemerintah.

Dalam program ini, khususnya kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan mengarah pada peningkatan peranan dan fungsi perpustakaan dalam membina minat baca masyarakat.

1. Hasil Yang Dicapai

a. Program Pendidikan Aparatur Pemerintah.

- 1) Pengangkatan pegawai baru tahun anggaran 1982/1983, termasuk sisa tahun 1981/1982, sejumlah 129 orang (36 orang diapelkan).
- 2) Pengangkatan Pegawai Sipil sejumlah 160 orang.
- 3) Pengangkatan Pejabat Pimpinan, sejumlah 32 orang.
- 4) Pelantikan Pejabat Pimpinan, sejumlah 49 orang (termasuk Pusat-pusat)
- 5) Pemberian tunjangan Jabatan Pimpinan, sejumlah 326 orang.
- 6) Peninjauan masa kerja, sejumlah 3 orang.
- 7) Kenaikan pangkat, sejumlah 269 orang (18 orang diapelkan).
- 8) Penyesuaian ijazah, sejumlah 22 orang.
- 9) Latihan Pra Jabatan, sejumlah 76 orang (peserta 83 orang, lulus 76 orang, tidak lulus 7 orang).
- 10) Ujian Dinas tingkat I dan II, sejumlah 56 orang (peserta 65 orang, lulus 56 orang, tidak lulus 9 orang).
- 11) Penugasan Pendidikan/Latihan:
SESPA, sejumlah 1 orang.
- 12) Tugas Belajar:
 - a) Dalam Negeri : Nihil
 - b) Luar Negeri, sejumlah 19 orang.
- 13) Penugasan Pendidikan/Latihan (Diklat) untuk:
 - a) Ijin belajar ke Perguruan Tinggi, sejumlah 4 orang.
 - b) Ijin belajar SMTP/SMIA (yang sederajat) sejumlah 17 orang.
 - c) Penataran Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P2) sejumlah 1 orang.
 - d) Penataran keterampilan Manajemen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah 10 orang.
 - e) Penataran Pendidikan Kependudukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah 3 orang.

- f) Penataran Bendaharawan Departemen Keuangan Republik Indonesia, sejumlah 1 orang.
 - g) Penataran kursus Dasar-dasar "ANDAL" Phase IV pada Universitas Indonesia, sejumlah 3 orang.
 - 14) Kenikan gaji berkala, sejumlah 209 orang.
 - 15) Pemberian cuti:
 - a) Cuti besar (biasa), sejumlah 3 orang.
 - b) Cuti besar menjelang pensiun, sejumlah 21 orang.
 - c) Cuti tahunan, sejumlah 10 orang.
 - d) Cuti hamil, sejumlah 10 orang.
 - e) Cuti alasan penting, sejumlah 5 orang.
 - 16) Permintaan KARPEG, sejumlah 125 orang (2 orang diapelkan).
 - 17) Pemberhentian:
 - a) Atas permintaan sendiri sejumlah 4 orang (termasuk 1 orang meninggal).
 - b) Tidak atas permintaan sendiri : Nihil.
 - 18) a. Pemensiunan pegawai, sejumlah 12 orang (pensiun pegawai 12 orang, pensiun janda: nihil).
 - b) Bebas tugas, sejumlah 21 orang.
 - 19) a) Pegawai teladan, sejumlah 6 orang.
 - b) Satya Lencana, sejumlah 42 orang.
 - 20) Penyelenggaraan persuratan:
 - a) Surat masuk : 2.233 buah.
 - b) Surat keluar : 1.267 buah.
 - c) Surat Keputusan : 706 buah.
 - 21) Penyebaran peraturan, sejumlah 2 buah.
- b. Program Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 1) Kegiatan penyelenggaraan administrasi umum
 - a) Telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan:
 - (1) Pemrosesan surat-surat masuk, berjumlah 22.768 pucuk dan surat keluar, berjumlah 17.411 pucuk.
 - (2) Pemberian nomor surat keluar 3.271 nomor surat, termasuk Keputusan di Bidang Kepegawaian, dan 33 nomor kawat.

- (3) Penggandaan dengan foto copy 34.579 lembar dan stensilan 150.849 lembar.
- (4) Telah diseleksi sebanyak 175 ordner dan telah diberi nomor sebanyak 90 ordner.
- (5) Telah dipersiapkan untuk disusutkan + $1\frac{1}{2}$ m³, terdiri dari 30 ikat berkas-berkas yang bukan arsip.
- (6) Penambahan koleksi perpustakaan berupa hadiah dari Balai Pustaka 150 judul dan pembelian 20 judul, koleksi yang telah diproses dan siap pakai sebanyak 650 judul.
- (7) Pengadaan alat tulis kantor (lihat lampiran)
- (8) Menyusun laporan inventaris/barang milik negara tahunan dan penghapusan barang inventaris milik negara dari unit-unit Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kesenian, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Permuseuman dan Museum Nasional.
- (9) Pemeliharaan gedung kantor dengan rehabilitasi gedung, meliputi kegiatan/pekerjaan sebagai berikut: perbaikan kamar kecil lantai II, penggantian dog seng sekeliling taman tengah, dan dog seng belakang seluas 500 m², pembuatan pintu dan kamar kecil di lantai bawah 2 buah, pengecatan seluas 675 m², penyempurnaan ruang cafetaria, koperasi, ruang pool kendaraan dan lain-lain, seluas 250 m².
- (10) Pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess secara berkala dilakukan (1 rumah jabatan/dinas di Pulau Raya dan mess di Jalan Rasamala 2, Jakarta).
- (11) Keamanan dilakukan oleh Satpam, keamanan atau Satpam dibantu dari tenaga veteran, semuanya berjumlah 20 orang.
- (12) Pemeliharaan dan penataan kembali instalasi telepon baik sentral telepon maupun pesawat telepon sesuai dengan unit karya yang ada.
- (13) Pengaturan/pemakai ruang sidang cukup banyak peminat sehingga tercatat 246 kali ruang sidang dipakai dari berbagai unit kerja. - tamu yang mendaftar pada resepsionis ada 1.182 orang untuk unit-unit kerja yang ada di Jalan Cilacap 4, Jakarta.

- (14) Pemeliharaan kendaraan dinas yang berjumlah 17 buah roda 4 dan 9 buah roda 2 berjalan sesuai kemampuan dana yang tersedia.
Berdasarkan Keppres No. 5/83 telah dijual 16 buah kendaraan roda 4 dan 34 buah roda 2.
 - (15) Pemeliharaan alat-alat perkantoran seperti mesin-mesin tik, mesin hitung, stensil, foto copy dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan dana pendukungnya.
 - (16) Pelayanan kesehatan oleh poliklinik baik umum maupun gigi selama setengah tahun mencapai 6.894 orang pasien dari berbagai unit kerja baik pegawai maupun keluarganya.
 - (17) Pelayanan kesejahteraan pegawai meningkat ada makan siang 4 hari seminggu, ada koperasi, penyaluran beras, perumahan dinas.
 - (18) Pelayanan keperluan sehari-hari perkantoran seperti ATK, alat listrik, alat kebersihan dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan dana yang ada dan apabila ada kekurangan mendapat bantuan dari proyek.
 - (19) Perjalanan dinas dengan berbagai tujuan dan tugas telah diterbitkan sebanyak 143 buah SPPD.
- b) Telah dilaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dengan hasil sebagai berikut:
- (1) Telah dilaksanakan inventarisasi bahan-bahan bagi penyusunan perencanaan sistem dan prosedur kerja yang sudah berlaku.
 - (2) Telah dihasilkan peraturan perundang-undangan kebudayaan yang meliputi 16 Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Daftar lengkap surat-surat keputusan tersebut dalam lampiran.
 - (3) Telah dilaksanakan kegiatan monitoring ABRI masuk desa dalam rangka Tim Asistensi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 2 kali.
 - (4) Pengolahan jawaban atas pertanyaan DPR RI Komisi IX sebanyak 3 kali.
 - (5) Telah dilaksanakan pengelolaan secara administratif pelaksanaan pejabat-pejabat/petugas-petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berangkat ke luar negeri dalam rangka seminar, konferensi, kursus dan lain-lain, sejumlah 28 orang.

- c) Telah dilaksanakan pengelolaan bidang keuangan meliputi:
- (1) Mengevaluasi hasil pembahasan Pra DIK dengan DIK dan Anggaran tahun 1982/1983 dengan 1983/1984.
 - (2) Mengumpulkan data penyusunan UKOR/Pra DUK atau RBNK.
 - (3) Mengajukan revisi DIK, UPT Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - (4) Mengajukan pencairan dana pemeliharaan kendaraan dinas 21 Unit Pelaksana Teknis dan penyelenggaraan Administrasi Umum pada m.a. 260 (lain-lain) sebanyak Rp 25.068.000,- untuk biaya tambahan HAPSAK Pancasila dan Rapat Kerja, dan mengusulkan subsidi 184 organisasi kesenian.
 - (5) Mengajukan Anggaran Belanja Tambahan khususnya langganan listrik, telepon dan air 8 Unit Pelaksana Teknis untuk Museum Nasional, Gedung Sumpah Pemuda dan Gedung Konferensi Asia Afrika serta Kantor Borobudur di Jakarta.
 - (6) Mengadakan pengumpulan data laporan (dari laporan SPJR 33 UPT Daerah dan 6 Kantor Pusat), dan mengadakan evaluasi pelaksanaan anggaran antara DIK dan pelaksanaannya.
 - (7) Pemeriksaan SPJP sejumlah 2.462 berkas.
- d) Telah dilaksanakan kegiatan perencanaan meliputi:
- (1) Pengembangan Model Perencanaan Diklusepora dan Kebudayaan (kerja sama Balitbang dengan direktorat Jenderal Kebudayaan).
 - (2) Penyusunan Bahan Panjatap sebanyak 19 informasi, bahan Rakor Kesra sebanyak 11 masalah dan informasi.
 - (3) Penyusunan Laporan Tengah Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1983/1984.
 - (4) Pengolahan Laporan Tengah Tahunan dan tahunan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan.
 - (5) Pemrosesan usulan pencairan dana dan surat-surat persetujuan.
 - (6) Pengolahan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan Badan Pengawas Keuangan.
 - (7) Pemrosesan pengadaan peralatan melalui Sekretariat Negara.

- (8) Penyusunan petunjuk pelaksanaan atau Juklak pendataan kebudayaan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
 - (9) Bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kuesioner data kebudayaan, dalam rangka uji coba ke daerah-daerah seluruh Indonesia.
 - (10) Mengumpulkan dan menyusun daftar nama dan alamat Penilik Kebudayaan seluruh Indonesia.
 - (11) Menyelenggarakan pameran dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 1983.
 - (12) Menyusun dan mengolah data benda-benda tak bergerak dari laporan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- 2) Penyelenggaraan Pembinaan Kebudayaan.
- a) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.
 - (1) Sub Bagian Pembinaan Sejarah.
 - (a) Penyusunan bahan/materi ujian mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk ujian dinas tingkat II, dan penilaian nilai ujian mata pelajaran sejarah Indonesia ujian dinas tingkat II Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1983.
 - (b) Penyusunan bahan/materi dan bantuan tenaga pada mata pelajaran Sejarah Indonesia pada Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Keuangan tahun 1983.
 - (c) Mengadakan diskusi-diskusi secara teratur tentang Sejarah dengan Musyawarah Guru Bidang sejenis (M.G.B.S.) di DKI dan Jawa Timur.
 - (d) Pengkajian dan penilaian buku-buku sejarah untuk Sekolah Dasar.
 - (e) Pengumpulan bahan/materi sejarah untuk pendidikan.
 - (f) Mengkaji, menanggapi dan pengajaran saran-saran bagi penyempurnaan naskah, Bangsa Indonesia keturunan Arab memproklamirkan diri sebagai Inlander (Buniputera) pada tahun 1886 dan 1934, dan naskah sejarah perjuangan Dalam Kusuma Ratu melawan Belanda di Panengahan Lampung.

- (g) Pencatatan dan pengumpulan/materi tentang masalah Kesejarahan, kesadaran sejarah dan tokoh sejarah.
 - (h) Penelaahan dan pengkajian hakikat pembangunan Monumen Pancasila Sakti.
- (2) Sub Bidang Sistem Budaya.
- (a) Penyusunan pedoman pelaksanaan penyusunan data informasi Sistem Budaya dan mengatur sumber data yang ada, penentuan lokasi sumber data, pembuatan formulasi pendataan, perencanaan peralatan, pengambilan penyusunan dan lain-lain.
 - (b) Studi kelayakan tentang peranan dasar pada masyarakat pedesaan, sebagai pusat kebudayaan, nilai, gagasan dan keyakinan yang terdapat pada teknologi pedesaan dalam rangka menerima teknologi baru, kepercayaan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta studi kelayakan tentang sistem pengendalian sosial dalam masyarakat.
- (3) Sub Bidang Lingkungan Budaya.
- (a) Studi Kepustakaan dan pengumpulan data dalam rangka penulisan naskah yang berisi diskripsi 30 kota Pelabuhan di Indonesia, pembuatan 1 buah peta suku bangsa asli di Propinsi Nusa Tenggara Timur, pembuatan 2 buah peta suku bangsa pendatang di Propinsi Bengkulu dan Sumatra Selatan.
- (4) Sub Bidang Dokumentasi dan Publikasi.
- (a) Melanjutkan registrasi daftar tenaga Kesejarah dan Nilai Tradisional untuk 12 propinsi.
 - (b) Mengirimkan buku-buku terbitan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional pada instansi/organisasi yang membutuhkan (200 judul).
 - (c) Mempersiapkan administrasi pembuatan Direktorat lembaga-lembaga dokumentasi.
 - (d) Penyusunan daftar 159 judul buku yang sudah diseleksi dalam rangka usaha peralihan dan pembelian buku-buku pustaka.
 - (e) Penataan koleksi buku-buku hadiah untuk kepustakaan 254 judul.

- (f) Penyusunan daftar langganan majalah dalam dan luar negeri dan penataan koleksi majalah-majalah hadiah untuk perpustakaan.
 - (g) Pengregistrasian dan pengklasifikasian 50 judul baru untuk perpustakaan.
 - (h) Mempersiapkan penerbitan 3 naskah bibliografi artikel kebudayaan dari majalah kebudayaan.
 - (i) Siap untuk dijilid 10 buah klipping artikel dan berita kebudayaan dari surat kabar.
 - (j) Penyusunan daftar upacara tradisional di daerah (84 dari kuesioner yang dikirimkan).
 - (k) Perekaman dari video Upacara Pesta Laut (nyadran) di Pelabuhan Ratu Jawa Barat dan persiapan perekaman film video Upacara Panen Sarang Walet di Cilacap Jawa Tengah.
- (5) Sub Bidang Nilai Budaya.
- (a) Penyusunan dan pengiriman instrumen penelitian ceritera rakyat, permainan rakyat, naskah kuno di daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 - (b) Penyusunan dan pengiriman instrumen penelitian upacara tradisional.
 - (c) Perekaman Upacara Tradisional: Upacara Nyadran di Pelabuhan Ratu dan Upacara menuai sarang burung di karang bolong Cilacap dalam rangka upacara yang ada hubungannya dengan kepercayaan dan peristiwa alam.
 - (d) Penulisan naskah-naskah ceritera rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional untuk dimuat di majalah BALITA.
 - (e) Penulisan naskah skenario untuk TVRI dalam rangka penyebarluasan kebudayaan dan penulisan naskah skenario tentang ceritera rakyat: Lancang Kuning.
 - (f) Penelitian dan pengarahannya skenario film kebudayaan produksi swasta nasional yang telah diteliti dan diarahkan antara lain film Prabu Siliwangi, film Pendawa Lima, film Ken Arok.
 - (g) Penataran 10 tenaga teknik penelitian dan penulisan Ungkapan Tradisional dan Upacara Tradisional, 10 orang tenaga teknik editing, 10 orang tenaga ilmu Kependudukan dan hubungan dengan Nilai Tradisional.

- (h) Pembelian kamus ensiklopedi Indonesia yaitu: Ensiklopedi II, III dan IV.
- (6) Pembinaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
 - (a) Pembinaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
 - (b) Pengamatan, perekaman, penelitian penulisan masalah **kesejarahan** dan kebudayaan daerah, ceramah dan sarasehan.
- b) Bidang Kesenian.
 - (1) Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penggalian:
 - (a) Penggalian seni patung primitif di Maluku dalam tarap persiapan.
 - (b) Penggalian Gending Bedoyo di Jawa Tengah dalam tarap penjajagan.
 - (c) Penggalian teater rakyat Topeng Salangit di Cirebon dalam tarap penggarapan.
 - (d) Penggalian teater Tetayungan di Kalimantan dalam perencanaan operasional.
 - (e) Penggalian kesenian tradisional Didong di Gayo (Aceh) dalam tarap penggarapan penyuntingan hasil.
 - (2) Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan apresiasi seni:
 - (a) Pergelaran seni tari Ramayana, dua kali, Aneka Tari Daerah, satu kali.
 - (b) Pergelaran musik keroncong satu kali.
 - (c) Pergelaran seni teater dalam hal ini wayang kulit purwo semalam suntuk satu kali.
 - (d) Pemberian ceramah pada pekan seni budaya Sumatra Barat tahun 1983 dan pertemuan teknis periodik Direktorat Kesenian.
 - (e) Mengikutsertakan dalam pameran lukisan anak-anak Indonesia pada pameran Internasional di Argentina, Turki, Jepang, Polandia dan India.
 - (f) Menyiapkan penyelenggaraan pameran keliling anak-anak ASEAN ke 2 di Indonesia yang akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan Oktober 1983. Indonesia mengikutsertakan 30 karya lukisan anak-anak.
 - (3) Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan mutu:
 - (a) Pengolahan tari kreasi baru Betawi, Banyumas, dan tari-tarian daerah Jambi dalam tarap persiapan.

- (b) Pengolahan Teater Tradisional Topeng Salangit di Cirebon, Teater Modern Jakarta, Teater T tutur Bandung dalam tarap persiapan.
 - (c) Pengolahan sastra daerah (Jakarta), Puisi (Sukabumi), dalam tarap persiapan.
 - (d) Pengolahan wayang purwa/pakeliran padat (Jakarta), wayang Bali (Jakarta), dalam tarap persiapan.
 - (e) Pengolahan tari rakyat Seudati (Aceh), Kiprah Glipang (Probolinggo) dalam tarap persiapan.
 - (f) Pengolahan tari anak-anak Jaranan Dril (Jawa Timur), tari anak-anak Gala Kuning (Jakarta) dalam tarap persiapan.
 - (g) Pengolahan tari klasik Sunda, tari Gambuh (Jakarta) dalam tarap persiapan.
 - (h) Pengolahan seni lukis kaca (Cirebon), wayang Beber (Pacitan) patung primitif (Maluku Tenggara), Ragam Hias Dua Dimensional yang ada kaitannya dengan arsitektur tradisional Toraja, dalam tarap persiapan.
 - (i) Pengolahan musik rakyat (Solo), Musik rakyat (Yogyakarta), musik anak-anak (Jakarta), dalam tarap persiapan.
 - (j) Menyusun konsep gending lancar dan ketawang gaya Yogyakarta dan gending wayang purwo.
- (4) Telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan:
- (a) Pengumpulan Gending Sendratari Arjuna Wiwaha.
 - (b) Menginventarisir lagu anak-anak dari daerah Sunda 34 buah, Jawa 29 buah, dan Bali 30 buah.
 - (c) Pengumpulan data asembel musik daerah.
 - (d) Mencatat komponis Indonesia yang mencipta musik anak-anak dari Jawa 10 orang, Sunda 1 orang, dan Bali 1 orang.
 - (e) Mengumpulkan tulisan tentang anak-anak sebanyak 32 naskah dari ceramah, naskah seni dan media massa.
 - (f) Mengumpulkan data seni tari khususnya pencatatan kostum, repertoire dan sinopsis tari rakyat, tari kreasi baru, dan tari anak-anak.
 - (g) Pekan seni budaya di Padang, Sumatra Barat tahun 1983.
 - (h) Penyuluhan kepada seniman dan petugas di Taman Budaya mengenai penyelenggaraan teknis lomba seni.

- (i) Memproses subsidi kesenian kepada organisasi kesenian sebanyak 65 berkas permohonan dan pemberian bantuan tenaga teknis, fasilitas tempat dan perlengkapan kepada badan/lembaga kesenian yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian berupa kursus/latihan: musik anak-anak dan remaja bina musika, tari Jawa, Tari Sunda, Paduan Suara Ibu-ibu.
- (5) Telah dilaksanakan kegiatan pelestarian:
 - (a) Penyempurnaan diskripsi slide, film kesenian.
 - (b) Pengumpulan data peta seni dari 8 propinsi.
- (6) Telah dilaksanakan kegiatan pendokumentasian:
 - (a) Penyusunan album seni patung di Kalimantan Selatan.
 - (b) Penulisan notasi sinden (lanjutan), dalam penggarapan.
 - (c) Penulisan notasi musik daerah Bali dalam tarap penggarapan.
 - (d) Menggambar alat musik alat tradisional dari Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku serta gamelan Jawa, Bali, Sunda dan Kalimantan.
 - (e) Penggandaan dan pendokumentasian hasil sarasehan seni pertunjukkan rakyat di Yogyakarta.
 - (f) Penyusunan klipping brosur mengenai berita budaya dari surat kabar: Kompas, Merdeka, Sinar Harapan, Berita Buana, Suara Karya dan pengelolaan koleksi buku kesenian 159 judul terdiri dari 255 eksemplar, dan majalah.
- (7) Telah dilaksanakan pengelolaan administrasi, prasarana dan sarana:
 - (a) Memproses 2.720 berkas surat masuk, dan 555 berkas surat keluar, mengelola arsip.
 - (b) Mengelola gedung kantor, rumah dinas, perlengkapan teknis dan alat-alat mobilitas serta komunikasi.
- (8) Telah dilaksanakan pembinaan Taman Budaya di 13 Propinsi:
 - (a) Penyajian seni berupa pameran, pertunjukan, festival, ceramah, perlombaan duta seni, sarasehan.
 - (b) Peningkatan mutu seni rupa, penggalian dan pemeliharaan seni daerah kesenian di daerah.
 - (c) Peningkatan mutu seni sastra dan teater.
 - (d) Peningkatan mutu seni musik dan tari.

c) Bidang Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (1) Menyajikan data tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Hari Pendidikan Nasional.
- (2) Menyusun program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 1983/1984 (1 naskah).
- (3) Menyusun kriteria penilaian hasil pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (1 naskah).
- (4) Pembinaan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:
 - (a) Memberikan pengarahan pada berbagai kesempatan pertemuan yang diselenggarakan oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 3 kali yaitu: Himpunan Penghayat Kepercayaan tingkat I Jawa Timur, Sumareh, Trisabdo Tunggal.
 - (b) Penyebaran hasil terbitan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejumlah 2.467 eksemplar.
- (5) Mengadakan konsultasi dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan instansi yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2 kali yaitu dengan Himpunan Penghayat Kepercayaan atau HPK.
- (6) Pengarahan terhadap tenaga pelaksana Direktorat Pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2 kali dengan jumlah 28 orang.
- (7) Mengusahakan penambahan pegawai dan rintisan susunan organisasi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejalan dengan beban kerja yang semakin meningkat telah mengajukan kepada Direktur Jenderal dengan surat nomor 097/F.3.1/C.5/1983 tanggal 6 Maret 1983.

d) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- (1) Penelitian.
 - (a) Telah dilaksanakan penelitian Klausa dan Subjek Bahasa Indonesia, sastra lama 4 judul dan evaluasi bahan ujian bahasa asing di Proyek Perintis dan EBTA Nasional.
 - (b) Sedang dilaksanakan penelitian karya sastra lama 2 judul, karya sastra daerah 1 judul, bunyi bahasa 4 judul.

- (c) Persiapan penelitian karya sastra lama 3 judul dan sastra daerah 1 judul dan penelitian pengajaran bahasa asing di SMP dan SMA 3 judul.
 - (d) Penelitian kosa kata baru dalam surat kabar dan majalah melalui pengklipingan (1.150 kata).
- (2) Pengembangan Bahasa yang meliputi:
- (a) Sedang dilaksanakan penyusunan peta bahasa-bahasa di Indonesia, dan penyusunan biografi Pengarang Sastra Indonesia Modern.
 - (b) Telah dilaksanakan penyusunan kamus bahasa Indonesia: Jilid pertama terdiri dari huruf A sampai dengan huruf L dan jilid kedua terdiri dari huruf M sampai dengan Z. Garapan sekarang telah sampai pada cetak coba untuk huruf-huruf A, B, C, dan F.
 - (c) Telah dilaksanakan penyusunan klipping tulisan bahasa dan sastra.
 - (d) Telah dilaksanakan pengolahan hasil penerbitan pemakaian bahasa Indonesia dalam nama badan-badan usaha.
 - (e) Pengartuan pertanyaan bahasa Indonesia dari peminat acara pembinaan bahasa Indonesia di TVRI (200 kartu).
 - (f) Penyuluhan bahasa Indonesia melalui TVRI 26 kali, menghasilkan 26 naskah, dan melalui RRI 26 kali, menghasilkan 26 naskah.
 - (g) Penyuluhan bahasa Indonesia di instansi Pemerintah dan Swasta (18 instansi dengan 630 peserta).
 - (h) Penyuluhan kebahasaan melalui surat menyurat sebanyak 160 kali, melalui media lain sebanyak 775 kali.
 - (i) Penyebarluasan pedoman Penyelenggaraan Bulan Bahasa 1983 kepada unit-unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan:
- (a) Pengolahan koleksi perpustakaan 1.688 judul.
 - (b) Pengolahan daftar terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1.000 eksemplar.
 - (c) Penyusunan kartu katalog 1.688 judul buku.
 - (d) Pengartuan buku-buku bahasa asing yang ada di perpustakaan 100 judul buku.

- (e) Penerbitan buletin informasi mutakhir 1.500 eksemplar.
 - (f) Penyebarluasan hasil terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2.000 eksemplar.
 - (g) Pertemuan tenaga penyunting 12 kali, tenaga penyuluh 24 kali.
- (4) Telah dilaksanakan pembinaan 3 Balai Penelitian Bahasa
- (a) Penelitian, penyusunan, penterjemahan.
 - (b) Penyuluhan bahasa melalui media siaran TVRI/RRI, surat kabar/majalah, mimbar karya penataran.
 - (c) Sayembara mengarang.
- 3) Penyelenggaraan Museum dan Kepurbakalaan.
- a) Bidang Permuseuman.
- (1) Survai ketiga museum negeri yang dipersiapkan untuk difungsikan (Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur).
 - (2) Penyempurnaan pedoman pelaksanaan teknis proyek-proyek museum.
 - (3) Pengumpulan data koleksi dan sarana museum umum tingkat propinsi dan data koleksi yang bernilai wawasan Nusantara.
 - (4) Tersusunnya rancangan konsep naskah pengaturan Museum Khusus dan rancangan bahan pengarah untuk peningkatan koleksi dan sarana museum-museum khusus serta rancangan bahan pengarah untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga museum-museum khusus.
 - (5) Pengadaan sebagian peralatan peragaan laboratorium konservatori.
 - (6) Konservasi penyajian pameran tetap Museum Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan supervisi dan bimbingan tata pameran tetap Museum Sumatra Barat dan Jawa Barat.
 - (7) Pengumpulan data sistem pengamanan di daerah Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan.
 - (8) Konsep pemeliharaan dan fungsionalisasi bangunan museum propinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah.
 - (9) Gambar denah 10 Museum Propinsi.
 - (10) Konsep naskah buku petunjuk pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran bangunan.

- (11) Tersusunnya data informasi permuseuman tahun 1981 (81 museum) dan terkumpulnya data kuesioner permuseuman tahun 1982 (9 museum).
- (12) Terkumpulnya naskah majalah "Museografia" jilid XIII Nomor 1, dan pencetakan brosur 2 judul.
- (13) Memberikan bimbingan dan supervisi sistem administrasi keuangan Unit Pelaksana Teknis.
- (14) Identifikasi dan pembinaan kepegawaian Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis.
- (15) Pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan atap dan pemasangan jendela nako di ruangan auditorium dan kendaraan dinas 2 roda 4 dan 1 roda 2, inventaris kantor, benda-benda koleksi dan perbaikan peralatan.
- (16) Pengadaan pakaian kerja/dinas untuk 34 orang.
- (17) Telah menghadiri konferensi ke XIII ICOM di London dan ASEAN Curators of Arts Exchange Programme.
- (18) Kerja sama dengan BPHN dalam rangka penyusunan RUU Permuseuman.
- (19) Bantuan Museum KAA, Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda.
- (20) Pengadaan koleksi ethnografi berupa tenunan Kalimantan, Batak, Jambi dan Minangkabau serta peralatan upacara kematian suku Dayak Iban.
- (21) Telah dilaksanakan pembinaan 12 Museum Propinsi:
 - (a) Inventarisasi jenis koleksi, dan registrasi koleksi.
 - (b) Pengadaan koleksi.
 - (c) Konservasi dan preparasi koleksi, restorasi dan reproduksi koleksi.
 - (d) Peningkatan apresiasi museum kepada anak sekolah melalui kunjungan dan pada masyarakat melalui siaran TVRI/RRI serta pameran.
- (22) Museum Nasional, hasil yang telah dicapai:
 - (a) Pengadaan koleksi dengan pengamanan: benda prasejarah 143 buah, benda ethnografi 5 buah, benda numismatik 34 buah, benda geografi 100 buah.
 - (b) Penomoran pada koleksi ethnografi 50 nomor dan koleksi prasejarah 5 nomor.

- (c) Perawatan koleksi berupa konservasi koleksi 1.685 buah, restorasi koleksi 60 buah, reproduksi koleksi 270 buah, replika 1 jenis.
 - (d) Penyempurnaan kata pameran tetap berupa: pembuatan label group, label individual, penambahan foto koleksi, perbaikan peta, penggantian kunci vitrin.
 - (e) Penerbitan folder 2.000 eksemplar.
- b) Bidang Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- (1) Pemetaan, penggambaran dan pemotretan serta pendataan lingkungan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jalan Salemba 4, Jakarta Pusat.
 - (2) Pendataan kembali gedung bersejarah IPPHOS di Jalan Hayam Wuruk No. 30 Jakarta Pusat dalam rangka penilaian kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Nomor 118 tahun 1977 tentang dietapkannya gedung tersebut sebagai monumen.
 - (3) Perijinan benda-benda cagar budaya: perijinan membawa benda-benda keluar wilayah Indonesia, tujuan Singapura, Belanda dan Jepang sebanyak 457 buah.
 - (4) Ijin penggunaan situs/bangunan cagar budaya bagi Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Plaosan dan Komplek Makam Sunan Giri untuk keperluan shooting film dan pemakaman keluarga.
 - (5) Pemindahan/pendataan temuan fosil badak kuno (Rhinocerus) dari situs temuan di kampung Cisereh, desa Kadujaya, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang ke Jakarta, milik H. Sunata, luas situs ± 4.000 m².
 - (6) Perawatan benda-benda koleksi studi pengamanan berupa beberapa buah guci dan benda keramik.
 - (7) Pemberian ganti rugi kepada Sdr. Ganda Susana (Pasar Minggu) atas 16 buah piring keramik (stone ware).
 - (8) Penerbitan Surat Keputusan Juru Pelihara seluruh Indonesia dan penerbitan Surat Keputusan penunjukkan situs makam dan bangunan bersejarah dan purbakala 3 propinsi.
 - (9) Penyerahan uang untuk pemeliharaan situs/bangunan makam yang berada di 7 Propinsi.
 - (10) Kerja sama dengan TVRI menyusun naskah tentang pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala dan kehidupan juru pelihara.

- (11) Studi kelayakan peninggalan sejarah dan purbakala di propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - (12) Menyusun persiapan SPAFA Workshop di Jawa Tengah.
 - (13) Mengumpulkan data laporan pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia yang sudah diterima.
 - (14) Membuat statistik pemugaran dan studi kelayakan di Indonesia.
 - (15) Telah dilaksanakan pameran kepurbakalaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung tanggal 19 sampai dengan 22 Mei 1983 di Gelanggang Olah Raga Jakarta Utara.
 - (16) Telah dicatat ke dalam buku induk registrasi obyek.peninggalan sejarah dan purbakala dari nomor 5476 sampai dengan 5605.
 - (17) Pembuatan panel pameran kepurbakalaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional atau HARDIKNAS.
 - (18) Telah dilaksanakan pembinaan pengelolaan 5 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
 - (a) Inventarisasi candi-candi dengan pemasangan papan-papan nama candi, heregistrasi, pembuatan katalog.
 - (b) Peningkatan pengenalan kepurbakalaan melalui pameran, penyuluhan dan bimbingan.
 - (c) Pengamanan peninggalan kepurbakalaan dengan penyebarluasan peraturan perlindungan cagar budaya nasional, pembinaan Satpam dan juru kunci.
 - (d) Pendokumentasian kepurbakalaan dengan pemotretan-pemotretan survai data-data kerusakan.
- c) Bidang Penelitian Arkeologi Nasional.
- (1) Perencanaan peninggalan-peninggalan yang merupakan gabungan antar unsur Pra sejarah dan unsur Hindu seperti situs-situs: Karangkamuyan dan situs Kawali. Temuan antara lain berupa: fosil-fosil, dolmen, menhir, yoni, fragmen candi, arca Ganesa, batu-batu prasasti.
 - (2) Peninggalan-peninggalan dari masa Hindu ditemukan di dua tempat yaitu Pangandaran dan Sukajaya. Temuan antara lain, genta perunggu, batu-batu prasasti.

- (3) Pola penempatan candi di tepi aliran sungai Ciseel membuktikan bahwa sungai tersebut pada masa lalu digunakan. Berdasarkan pengamatan lapisan tanah, kerusakan candi yang terletak dekat aliran sungai dan sering dilanda banjir. mengakibatkan runtuhnya bangunan tersebut.
- (4) Telah dilaksanakan pembinaan 2 Balai Arkeologi.
- (a) Mengadakan pendokumentasian peninggalan pra sejarah, masa Islam dengan pemotretan-pemotretan, mengadakan gambar/peta-peta.
- (b) Pengumpulan buku-buku/perpustakaan meliputi: menerima buku-buku, registrasi dan katalog, klipping berita kepublikasian.

c. Program Penelitian Aparatur Pemerintah.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan.

- a) Di Bidang Perencanaan dan Pemantapan Peraturan telah dicapai;
- (1) Tersusunnya perincian tugas semua unit dan pejabat pelaksana di lingkungan Pusat Pembinaan Perpustakaan.
- (2) Tersusunnya Rencana Kerja Bagian dan Bidang di lingkungan Pusat Pembinaan Perpustakaan.
- b) Di Bidang Pembinaan Tata Usaha.
- (1) Pengaturan arus surat keluar masuk: + 2.000 surat keluar dalam dan luar negeri, + 50 telegram keluar, + 3.000 surat masuk, + 20 telegram masuk.
- (2) Pengaturan arus barang habis dan keluar: Penataan arsip, pengaturan keamanan dan kebersihan kantor, pengaturan rapat-rapat dinas.
- c) Pembinaan koleksi perpustakaan.
- (1) Mempersiapkan pengadaan bahan pustaka bagi referensi, perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah serta perpustakaan lainnya.
- (2) Pengadaan perlengkapan perpustakaan: pembelian 400.000 kartu katalog.
- d) Pembinaan perpustakaan wilayah dan perpustakaan umum.
- (1) Menyelesaikan penyusunan program kerja bidang perpustakaan wilayah dan perpustakaan umum.

- (2) Merumuskan kebijaksanaan teknis pembinaan Perpustakaan Wilayah, Perpustakaan Keliling, dan Perpustakaan Umum.
 - (3) Mengadakan bimbingan kegiatan Perpustakaan Wilayah, Perpustakaan Umum, dan Perpustakaan Keliling.
- e) Pembinaan Perpustakaan Sekolah.
- (1) Menyelesaikan penyusunan program kerja bidang perpustakaan sekolah.
 - (2) Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pembinaan perpustakaan sekolah.
 - (3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kegiatan Perpustakaan Sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah.
- f) Pembinaan/Pendidikan Ketenagaan Perpustakaan.
- (1) Menyelenggarakan pendidikan tenaga teknis perpustakaan 6 bulan.
 - (2) Mempersiapkan program sertifikat, penataran perpustakaan dan dokumentasi, penataran tenaga perpustakaan umum di Jawa Barat, Maluku, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah masing-masing 30 orang, penataran tenaga perpustakaan sekolah di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu masing-masing 30 orang serta penataran bibliografi untuk 20 orang.
- g) Pembinaan dokumentasi dan publikasi.
- (1) Telah mengadakan 2 kali pameran perpustakaan.
 - (2) Mengadakan penerbitan:
 - (a) Daftar buku Indonesia terbitan tahun 1980 - 1983 yang ada dipasaran.
 - (b) Daftar buku terpilih terbitan asing beranotasi.
 - (c) Laporan hasil evaluasi kondisi Buku Bacaan anak-anak terbitan tahun 1971 - 1980.
 - (d) Daftar buku beranotasi Nomor 17 dan nomor 18.
 - (e) Leaflet Pusat Pembinaan Perpustakaan; Tugas dan fungsi.

h) Telah dilaksanakan pembinaan pengelolaan Perpustakaan Nasional.

Hasil Yang Dicapai:

- (1) Melaksanakan dan memproses buku, majalah, surat kabar, non books (mikro film/fische, yang didapat dari hadiah Departemen, non Departemen dan Lembaga-lembaga, penerbit, swasta:
 - Hadiah buku; 965 judul = 1.827 eksemplar.
 - Hadiah majalah: 834 judul yang aktif dari jumlah 4.000 judul.
 - Hadiah surat kabar: 46 judul (Jakarta dan Luar daerah).
 - Hadiah non books: 21 roll mikro film + 274 jacket mikrofis.
- (2) Melaksanakan pembelian buku-buku: 145 judul = 154 eksemplar dan langganan surat kabar 7 judul.
- (3) Melaksanakan pembelian buku luar negeri, registrasi buku yang masuk juga dari hadiah dan tukar menukar, dan majalah luar negeri.
 - Pembelian buku 3 judul = 26 eksemplar.
 - Hadiah dan pertukaran : 874 judul = 1134 eksemplar.
 - Hadiah dan pertukaran 30 judul baru.
- (4) Melaksanakan registrasi bahan pustaka yang diterima dari pengadaan dalam negeri dan luar negeri berupa:
 - Buku-buku dalam negeri, 1.539 eksemplar.
 - Buku-buku luar negeri, 2.379 eksemplar.
 - Majalah dalam negeri, 162 jilid.
 - Majalah luar negeri, 189 jilid.
 - Mikro film dalam dan luar negeri, 32 roll, mikro fis 9 reel= 136 lembar.
 - Peta terbitan dalam negeri = 277 set = 4.973 eksemplar.
- (5) Distribusi ditujukan kepada penerbit, instansi peserta program pertukaran, perpustakaan-perpustakaan, Departemen/non Departemen, Perguruan Tinggi negeri dan Swasta, IKIP, perorangan/pengarang yang berjumlah + 600 alamat dalam negeri. Untuk distribusi ke luar negeri: perpustakaan nasional di Australia, Malaysia, Singapura, Negeri Belanda, Amerika Serikat, dan Universitas beberapa negara.
- (6) Pengetikan kartu, pengetikan artikel majalah, kantong buku, label dan buku rutin = 1.762 eksemplar.

- (7) Memberikan informasi, bimbingan, referensi studi dan pelayanan kepada anggota dalam menggunakan katalog maupun koleksi dan membantu pelajar/mahasiswa dalam mencari bahan kepustakaan untuk persiapan pembuatan skripsi.
- (8) Jumlah pengunjung dari April 1983 s.d. September 1983 = 12.711 orang dan buku yang dipinjam berjumlah 6.612 buah serta yang dibaca 17.523 buah.
- (9) Jumlah anggota perpustakaan nasional dari April s.d. September 1983 berjumlah 364 orang.
- (10) Untuk melestarikan buku-buku langka dan surat kabar kuno, diadakan microfilming untuk surat kabar dan microfische untuk buku-buku:
 - Telah dibuat microfilm untuk masterlist 90 judul.
 - Dibuat buku induk untuk microfische.
 - Diadakan rechecking microfilm 942 judul, 1.877 reel.
 - Perawatan katalog buku-buku lama, pengetikan sheet katalog 1.491 lembar.
 - Penggantian etiket/label buku lama, pengetikan label buku 780 buku.
 - Perbaikan buku kuno yang rusak (dijilid kembali 147 buku).
 - Majalah untuk dibundel, majalah dalam dan luar negeri 167 bundel.
 - Penerbitan PBB 79 bundel.
 - Penelusuran seri monographis PBB yang belum dibuatkan entri 102 judul.
- (11) Pencetakan kartu stock barang, blanco-blanko, naskah katalog, majalah terbitan Indonesia 500 eksemplar, katalog induk nasional 1982 500 eksemplar, dan penjilidan supaya rapi.
- (12) Seleksi bahan pustaka dalam negeri 478 judul, yaitu dalam kaitannya dengan menunjang terbitan bibliografi nasional Indonesia.
- (13) Pengolahan bahan pustaka dalam negeri menunjang bidang koleksi yaitu sebanyak 330 judul, 476 eksemplar.
- (14) Mencatat semua penerbitan terjemahan dalam kaitannya pemberian data pada badan internasional yang menerbitkan indeks translationum 77 judul.

- (15) Menyusun katalog dari Library of Congress, Perpustakaan Yayasan Idayu PDIN-LIPI, Accession List dari Australia National Library, KITLV, dengan 1.400 judul.
 - (16) Penyusunan mater katalog kumulasi tahun 1981/1982 dari bibliografi nasional Indonesia, untuk kepentingan pelayanan koleksi deposit meliputi 4.000 judul.
 - (17) Penyusunan naskah indeks pemilu 1982 dari 11 surat kabar ibukota, 4 surat kabar daerah meliputi 6.000 artikel/berita.
 - (18) Pembuatan statistik masukan bahan pustaka koleksi deposit 1981/1982, menurut disiplin ilmu pengetahuan masing-masing 3.600 judul.
 - (19) Filling katalog dari 18 perpustakaan wilayah, 27 perpustakaan yang ada di Ibukota, penotoran berdasarkan data koleksi akuisisi 1978 dan seterusnya, yaitu dapat dilaksanakan sejumlah 4.961 judul dari 8 perpustakaan anggota.
 - (20) Menyusun/shelving semua penerbitan bibliografi dan penerbitan berbagai jenis abstrak, indeks sebagai pusat penyimpanan untuk menunjang tugas-tugas pelayanan informasi bibliografi nasional 11 judul.
 - (21) Korespondensi dalam negeri dan luar negeri khusus tentang bibliografi dan kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya 2 subyek dari luar negeri dan 9 subyek dari dalam negeri.
- i) Telah dilaksanakan pembinaan pengelolaan 25 Perpustakaan Wilayah.
- (1) Membina perpustakaan-perpustakaan Dati II dan perpustakaan sekolah.
 - (2) Mengadakan, menginventarisasi, mengolah buku-buku perpustakaan dan pendistribusian.
 - (3) Menyajikan dan melayani minat baca pada masyarakat/pengunjung.

2. Hambatan dan usaha penanggulangan

a. Program Pendidikan Aparatur Pemerintah

1) Hambatan

- a) Kelangkaan tenaga/pelamar sarjana muda dan sarjana dari jurusan yang diperlukan. Penyaringan pegawai baru tahun 1982/1983 yang dipusatkan, disamping kurang memenuhi harapan unit kerja ternyata kurang efektif.
- b) Pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, sejauh persyaratan teknis dipenuhi terlaksana sebagaimana diharapkan. Hambatan utama disebabkan adanya perbedaan tanggal/tempat lahir, kesalahan mengetik, penulisan ijazah dan sebagainya.

2) Usaha penanggulangan

- a) Salah satu cara mengatasi hambatan tersebut antara lain, mengadakan kontak dengan universitas, melalui penyebaran pengumuman penyaringan pegawai baru, dan sebaiknya setiap unit utama menyelenggarakan sendiri di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal pengadaan pegawai yang dibutuhkan.
- b) Melalui pernyataan surat menyurat telah diusahakan dengan usul, pengangkatan, kenaikan pangkat diharapkan lebih cermat sedang apabila terdapat yang meragukan diusahakan clearance secara khusus demi karier kelanjutannya.

b. Program Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Kegiatan Administrasi Umum

a) Hambatan

- (1) Masih kurang memadainya sarana, ruang kerja, dan jumlah tenaga yang terampil dan berkemampuan bila dibandingkan dengan jumlah beban dan jenis pekerjaan yang dihadapi.
- (2) Kurang lengkap dan tidak tepatnya waktu pengiriman laporan dari unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- (3) Terbatasnya dana pemeliharaan barang-barang inventarisasi, dan kesejahteraan pegawai baik dalam keperluan primer maupun sekunder.

- (4) Belum lengkapnya peraturan ketata-usahaan yang menyeluruh dan membaku sebagai pedoman induk, dan belum ada pengaturan batas-batas sebagai pedoman induk, dan belum ada pengaturan batas-batas yang jelas atas kewenangan dalam mengatur sistem dan prosedur kerja.
- b) Usaha penanggulangan
- (1) Memanfaatkan fasilitas dan tenaga yang ada
 - (2) Memberikan tegoran lisan, tertulis, telepon dalam hal kurang lengkap dan terlambatnya pengiriman laporan.
 - (3) Mengusahakan penggunaan dana yang tersedia berdasarkan prinsip tepat guna dan hasil guna serta tetap berpegang pada sistem prioritas dalam pelaksanaannya.
 - (4) Mengusahakan adanya program induk yang dapat dijadikan sumber penyusunan program kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan ketentuan-ketentuan untuk kewenangan dalam usaha pengaturan sistem dan prosedur kerja.
- 2) Kegiatan pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- a) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.
- (1) Hambatan
 - (a) Ketenagaan dalam bidang penelitian jauh dari memadai dibandingkan dengan banyaknya obyek penelitian yang tersebar di 27 propinsi.
 - (b) Sempitnya waktu yang tersedia dibandingkan volume kerja yang setiap waktu bertambah, karena selain melaksanakan kegiatan rutin juga menyelesaikan tugas-tugas instruksional dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional sendiri maupun dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (c) Waktu kegiatan tidak bersamaan dengan turunnya dropping dana.
 - (d) Hanya ada dua UPT saja dalam 27 propinsi dengan keterbatasan tenaga sarana dan dana.
 - (2) Usaha penanggulangannya
 - (a) Untuk menanggulangi keterbatasan tenaga teknis diusahakan:
 - secara berkala mengadakan diskusi, rapat-rapat, dan ceramah-ceramah kepada staf.
 - menugaskan pegawai mengikuti penataran-penataran, seminar-seminar dan tugas belajar di dalam negeri maupun di luar negeri.

(b) Sering terlambat diterimanya dana karena kecilnya anggaran untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan lain-lain, maka berbagai kegiatan dilaksanakan dengan jalan memasukkan ke dalam kegiatan proyek.

b) Bidang Kesenian

(1) Hambatan

- (a) Kegiatan penggalian suatu jenis kesenian membutuhkan waktu yang cukup panjang, hal ini disebabkan daerah-daerah yang akan digali keseniannya terpencar-pencar dan transportasi tidak mudah.
- (b) Di lain pihak waktu yang tersedia dan biaya transportasi kecil, mempersulit untuk mengadakan penggalian, dan hasilnya juga sangat minim
- (b) Tenaga kesenian yang langka, dan terbatasnya dana untuk memenuhi permintaan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk pelatih, bimbingan, penyuluhan
- (c) Tidak banyak ahli-ahli seni/seniman yang ada berminat menulis buku seni dan kurangnya buku terjemahan/saduran di masyarakat.
- (d) Kurangnya tenaga ahli untuk menyusun program, konsep kesenian, dan dana serta tenaga di UPT.

(2) Usaha penanggulangan

- (a) Secara bertahap meningkatkan pengetahuan para pejabat dan staf sehingga mampu melaksanakan tugasnya baik teknis maupun administratif
- (b) Diusahakan memanfaatkan ahli-ahli seni dan seniman berpengalaman, baik buah pikiran/keahliannya maupun tenaganya guna membina kader kesenian dan atau menuangkan dalam karya ilmiah bagi generasi selanjutnya.
- (c) Memanfaatkan ruang olah seni guna pembinaan dan pengembangan kesenian untuk latihan

c) Bidang Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

(1) Hambatan

- (a) Langkanya mencari tenaga yang memenuhi kualifikasi dan terbatasnya jatah formasi.

~~(2) Usaha penanggulangan~~

- ~~(a) Menerima tenaga yang dibiayai dengan dana proyek dan pelimpahan~~

~~d) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Bahasa~~~~(1) Hambatan~~

- ~~(a) Terbatasnya waktu dan jumlah tenaga ahli peneliti dan tenaga teknis~~
- ~~(b) Sebagian staf merangkap pekerjaan lain~~
- ~~(c) Banyaknya tugas tambahan yang mendesak, dan~~
- ~~(d) Fasilitas gedung kantor Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta belum memadai~~

~~(2) Usaha penanggulangan~~

- ~~(a) Pembagian tugas secara merata serta meningkatkan mekanisme kerja untuk seluruh karyawan~~
- ~~(b) Menggunakan ruangan yang ada semaksimal mungkin.~~

~~3) Kegiatan Pembinaan Museum dan Kepurbakalaan~~~~a) Bidang Permuseuman~~~~(1) Hambatan~~

- ~~(a) Keterbatasan tenaga, peralatan/fasilitas dan dana~~
- ~~(b) Droping biaya kepada PUMK belum lancar seperti yang diharapkan, adanya sisa kegiatan tahun lalu, data standardisasi konstruksi bangunan terlambat diterimanya, terbatasnya buku-buku reference permuseuman, kurang lancarnya arus komunikasi dari pusat maupun dari daerah~~

~~(2) Usaha penanggulangan~~

- ~~(a) Mendayagunakan tenaga, sarana dan dana yang ada.~~
- ~~(b) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga personil yang ada~~
- ~~(c) Peningkatan anggaran pada masa mendatang jatah formasi pengangkatan pegawai baru, dan penyelesaian pengangkatan pejabat eselon termasuk unit pelaksana teknis~~
- ~~(d) Penyelesaian penyaluran/pembelian peralatan/inventaris lebih diperlancar.~~

b) Bidang Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

(1) Hambatan

- (a) Terbatasnya/kurangnya tenaga ahli, yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja yang bersangkutan
- (b) Khusus untuk kegiatan rutin, dirasakan terbatasnya dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan teknis operasional seperti pemeliharaan, pemugaran konservasi dan penyuluhan
- (c) Ruang yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah tenaga sarana dan inventaris yang dewasa ini dimiliki
- (d) Kurangnya informasi, data dan laporan teknis dari daerah-daerah, karena belum semua daerah memberikan laporan teknis yang dikehendaki/ditetapkan.
- (e) Dirasakan belum merata penyebaran apresiasi masyarakat terhadap arti pentingnya warisan peninggalan sejarah dan purbakala bagi pembinaan kebudayaan nasional dan artinya bagi pembangunan nasional, sehingga masih terdapat tindakan-tindakan yang merugikan keutuhan dan kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala.

(2) Usaha menanggulangi

- (a) Perlu peningkatan jumlah tenaga dalam lingkungan perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala, khususnya tenaga-tenaga teknis di bidang pemugaran, konservasi dan arkeologi. Lebih-lebih setelah berakhirnya pemugaran Candi Borobudur pada akhir bulan Februari 1983 yang lalu, yang berarti tugas pemeliharaan dan pengembangan candi itu akan ditangani oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
- (b) Hendaknya dapat lebih ditingkatkan jumlahnya terutama untuk pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala, biaya supervisi pimpinan direktorat/kepala-kepala kantor suaka ke daerah lokasi kepurbakalaan yang letaknya sampai ke pelosok-pelosok
- (c) Ruang kerja perlu diperluas, disesuaikan dengan jumlah tenaga, sarana dan tugas-tugas dari tahun ke tahun semakin meningkat. Disamping itu belum dimanfaatkan salah satu ruangan

kantor Proyek Pemugaran Candi Borobudur di Jalan Gatot Subroto.

- (d) Kerjasama dengan instansi-instansi luar yang mempunyai tugas di bidang perlindungan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala kiranya perlu ditingkatkan sehingga usaha pembinaan pelestarian dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala bagi pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
- (e) Penyebaran informasi dan pengetahuan perlindungan/arkeologi melalui penataran, pengarahan teknis, temu karya dan sebagainya kepada para pejabat sampai ketinggian kecamatan di daerah, khususnya dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta masyarakat umumnya.
- (f) Melengkapi secara bertahap sarana/peralatan dan tenaga di bidang perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

c) Bidang Penelitian Arkeologi Nasional

(1) Hambatan

Terbatasnya tenaga pelaksana yang ada di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan masih perlunya penelitian arkeologi baik survai maupun ekskavasi yang lebih banyak dalam rangka tercapainya sasaran penelitian.

(2) Usaha penanggulangan

Dipandang perlu peningkatan baik jumlah personil maupun jangka waktu pelaksanaan dalam program penelitian dimasa-masa mendatang.

c. Program Penelitian Aparatur Pemerintah

1) Bidang Perpustakaan

a) Hambatan

- (1) Belum tersedianya ruang kerja dan pergudangan yang memadai
- (2) Kurangnya tenaga terdidik dan terampil dibidang perpustakaan serta lembaga pendidikan yang dapat menampung kebutuhan pendidikan perpustakaan
- (3) Belum adanya undang-undang deposit (UU wajib serah karya cetak)

(4) Rendahnya produksi buku nasional yang dapat mendukung pengembangan perpustakaan

b) Usaha penanggulangan

- (1) Memanfaatkan ruang kerja dan pergudangan yang ada sambil menunggu selesainya pembangunan gedung-gedung perpustakaan di daerah
- (2) Menyelenggarakan pendidikan, memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti kursus, latihan, penataran perpustakaan di dalam dan di luar negeri
- (3) Menghimbau kepada penerbit dan instansi pemerintah untuk menyerahkan 2 eksemplar terbitannya.

B. Program Pembangunan

1. Hasil yang dicapai:

a. Program Kepurbakalaan, Kesejarahan, dan Permuseuman:

1) Dalam rangka pengembangan permuseuman:

- a) Telah dilaksanakan berbagai studi antara lain studi perencanaan teknis edukatif cultural di Surabaya dan Palu, studi perencanaan teknis pengamanan permuseuman di Medan dan Ujungpandang, dan studi perencanaan teknis konservasi koleksi di Pontianak dan Palembang,
- b) Telah dilaksanakan survai pengadaan koleksi di 38 Dati II, dan telah dilaksanakan pengadaan 6 jenis koleksi meliputi 26 unit. Sedangkan untuk pengadaan koleksinya, oleh Pusat telah dilaksanakan pengadaan koleksi tenun tradisional nusantara, koleksi replika 2 buah yupa, 3 buah patung prasasti, dan 3 set koleksi miniatur Candi Borobudur dan Candi Prambanan,
- c) Telah dilaksanakan tahap persiapan temu karya RUU Permuseuman, melanjutkan pendataan museum umum dan museum khusus, penyusunan naskah siap cetak pengenalan 10 museum negeri propinsi dan buku pedoman hasil penelitian,
- d) Telah dilaksanakan 7 kali pameran, pemberian bantuan kepada 13 museum swasta dan transkripsi 2.100 halaman.
- e) Telah diadakan rehab kantor dan studi teknik gedung kantor Direktorat Permuseuman yang dalam keadaan miring, dan telah dilaksanakan pengadaan peralatan teknis 10 unit dan persiapan pembebasan tanah serta pengadaan bangunan 4.550 m².
- f) Dalam rangka pengembangan museum nasional telah dilaksanakan penyusunan 2 naskah design renovasi ruang pameran dan perintisan buku pedoman pengembangan museum nasional, 3 kali studi perbandingan koleksi meliputi: naskah kuno, koleksi, relik sejarah dan koleksi tenun double ikat.
Di samping itu dilaksanakan 2 kali pameran, heregistrasi dan reinventarisasi koleksi 1.852 buah/naskah, penyusunan 4 judul naskah dan penerbitan 4 judul sebanyak 18.000 eksemplar serta renovasi ruang koleksi, studi dan penataan koleksi arkeologi.

2) Dalam rangka pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala telah dilaksanakan:

- a) Pemugaran 5 buah mesjid/gereja dengan realisasi pelaksanaan \pm 3.100 m²/100 m², istana 3 buah \pm 550 m², kraton 5 buah \pm 4.100 m², makam 7 buah \pm 1.510 m³, taman purbakala 1 buah \pm 55 m², candi/batu candi 6 buah \pm 500 m², dan 3.100 m³, benteng 3 lokasi \pm 9.315 m³/36 m³, pura 2 lokasi \pm 400 m², taman sari/kolam 2 lokasi \pm 10.115 m², rumah adat 4 buah \pm 152 m², kota lama Banten dengan 4 situs \pm 7.500 m²;
- b) Pembangunan balai penyelamatan 1 lokasi \pm 30 m²;
- c) Studi teknis/studi kelayakan di 18 lokasi;
- d) Ganti rugi 6 buah rumah \pm 650 m²;
- e) Persiapan pembuatan master plan Bekas Ibukota Kerajaan Majapahit;
- f) Konservasi batu candi Borobudur \pm 225 m³;
- g) Lokakarya pemugaran dalam rangka SPAFA di Yogyakarta;
- h) Pemberian bimbingan teknis di 3 propinsi (Bali, Maluku, dan D.I. Yogyakarta);
- i) Registrasi, dokumentasi dan penyuluhan tentang peninggalan sejarah dan purbakala;
- j) Pameran kepurbakalaan di 2 lokasi dan siaran melalui TVRI, 1 kali.

b. Program Pengembangan Seni Budaya:

- 1) Pameran 13 kali di 8 propinsi, pameran foto keliling ASEAN dan Pasifik 2 kali.
- 2) Pagelaran 9 kali di 4 propinsi, 9 kali di pusat.
- 3) Sayembara 2 kali di 2 propinsi dan 5 kali di pusat.
- 4) Pekan/lomba/festival di 11 Dati II dari 11 propinsi dan penilaian seni di 25 propinsi.
- 5) Peralatan kesenian 130 unit untuk Dati II, Kecamatan dan Transmigrasi di 8 propinsi.
- 6) Penerbitan naskah tari daerah 2 judul di 1 propinsi.
- 7) Pendataan kesenian di 27 propinsi.
- 8) Konsultasi 6 kali dari 6 propinsi.
- 9) Penyuluhan kesenian 1 kali di 1 propinsi, dan rekaman 1 kali di 1 propinsi.
- 10) Bantuan kepada organisasi kesenian dan seniman.

c. Program Kebahasaan, Kesastraan, Perbukuan, dan Perpustakaan:

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa:
 - a) Telah dapat disusun bahan siaran pembinaan bahasa Indonesia di TVRI sebanyak 27 jenis naskah, penyusunan kamus dwibahasa daerah Indonesia 12 jenis, kamus istilah 7 jenis, daftar istilah hasil-hasil sidang 25 naskah bidang ilmu, penyusunan pedoman penulisan dan daftar peneliti kebahasaan sebanyak 5 judul serta penerbitan 12 naskah;
 - b) Telah diadakan peningkatan komunikasi kebahasaan melalui seminar penulisan bahan pengajaran bahasa 39 naskah, dan sayembara mengarang 174 naskah;
 - c) Telah diadakan pembinaan bahasa dan sastra melalui penataran tenaga penyuluh kebahasaan dan kesastraan 50 orang, tenaga penyunting 30 orang, dan beasiswa 200 orang.
- 2) Dalam rangka pembinaan perpustakaan:
 - a) Telah dilaksanakan pembuatan gambar pembaharuan gedung perpustakaan wilayah, penyusunan naskah/daftar buku beranotasi berekomendasi No. 1 tahun 1983, penyusunan daftar terpilih terbitan asing, penyusunan naskah penerbitan majalah perpustakaan sekolah dan umum No. 1 tahun 1983 guna bahan penyuluhan, penyusunan naskah bibliografi daerah di 11 propinsi;
 - b) Telah dilaksanakan penyusunan daftar usulan pembelian buku 26 proyek daerah untuk koleksi perpustakaan wilayah, umum Dati II, keliling, perintis sekolah dan lain-lain penerbitan judul-judul buku yang diinginkan oleh instansi-instansi seperti Direktorat Jenderal Kebudayaan, kantor pusat, perpustakaan wanita, perpustakaan bursa buku senam, perpustakaan pramuka Cibubur, perpustakaan jurusan ilmu perpustakaan fakultas sastra Universitas Indonesia;
 - c) Telah dilaksanakan pengkajian isi bantuan bahan pustaka hadiah badan/negara asing, dan telah disiapkan berita acara penilaian daftar usulan pembelian buku dari 6 proyek;

- d) Telah dilaksanakan penyusunan naskah 1 tahun 1983, siaran perpustakaan melalui TVRI, pameran perpustakaan menunjang kegiatan Hardiknas, bantuan Bappeda/Itkapi, dan sayembara perpustakaan untuk meningkatkan dan menggairahkan penyelenggaraan perpustakaan;
 - e) Telah dilaksanakan pengelolaan badan pertimbangan pengembangan buku nasional, penelitian sosial humanities, lomba penulisan naskah buku ilmu pengetahuan dan pengadaan peralatan kantor;
 - f) Telah dilaksanakan pengadaan 120 eksemplar buku-buku asing;
 - g) Telah disusun naskah bibliografi daerah di 11 propinsi;
 - h) Telah diadakan penjajagan lokasi tanah untuk perpustakaan wilayah di 5 lokasi/propinsi;
 - i) Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan pembebasan tanah perpustakaan wilayah di 8 lokasi/propinsi;
 - j) Telah disusun design gedung perpustakaan wilayah untuk 7 propinsi;
 - k) Telah disiapkan pelaksanaan pengadaan 107 buah peralatan buku dan teknis.
- 3) Dalam rangka pembinaan perpustakaan nasional:
- a) Telah dilaksanakan rekatalogisasi koleksi 4 komponen sejumlah 2.500 judul;
 - b) Telah dilaksanakan bahan pustaka asing 750 judul, peta 1.050 eksemplar dan majalah asing 1.000 judul;
 - c) Telah dilaksanakan pengolahan pustaka baik Indonesia dan Asing sejumlah 1.237 eksemplar;
 - d) Sudah diterbitkan Accession List No. 1 tahun 1983;
 - e) Telah dapat dilaksanakan penyusunan dan penerbitan katalog subyek PETA 4.000 entri, katalog surat kabar 1.500 entri, katalog subyek antropologi 2.500 entri, indeks artikel 6.000 entri, katalog induk nasional 15.000 entri, majalah bibliografi nasional (triwulan) dan koleksi tahunan 4.000 entri, bibliografi nasional ASEAN 1.600 entri;
 - f) Telah dapat diselesaikan dengan mikro film sebanyak 30 rol;
 - g) Telah difumigasikan 8.600 eksemplar;
 - h) Telah dijilid 1.000 eksemplar bahan pustaka yang rusak;
 - i) Telah diselesaikan draft pedoman sayembara design gedung perpustakaan nasional.

- 4) Dalam rangka pembinaan perbukuan:
 - a) Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan pengadaan majalah pengetahuan umum dan profesi.
 - b) Telah dilaksanakan persiapan penyelenggaraan sayembara mengarang buku bacaan populer.
 - c) Telah dilaksanakan pengumpulan bahan penerbitan majalah analisis kebudayaan.
 - d) Telah dilaksanakan persiapan penerbitan naskah buku bacaan sastra Indonesia dan daerah.
 - 5) Dalam rangka pengembangan media kebudayaan;
 - a) Penyusunan buku pedoman/pegangan kerja proyek 1 naskah.
 - b) Persiapan pembuatan bahan informasi kebudayaan dengan melalui media cetak dan media film.
 - c) Persiapan penyajian informasi kebudayaan.
 - d) Peningkatan kebijaksanaan antar instansi, 3 bentuk (KKPP, Wisata Budaya, KPP/Sensor, dukungan peristiwa nasional).
- d. Program Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- 1) Dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional:
 - a) Telah dapat dilaksanakan penyusunan 6 kerangka acuan (TOR) serta penetapan calon peneliti dan penulis.
 - b) Penelitian kepustakaan dan lapangan untuk 52 sasaran penulisan.
 - c) Telah menerbitkan 16 judul buku hasil penelitian tahun yang silam.
 - 2) Dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah:
 - a) Telah dapat dilaksanakan penyusunan 5 buah kerangka acuan dan petunjuk pelaksanaannya.
 - b) Telah melaksanakan pengarahannya kepada 350 orang tenaga penulis/peneliti 5 aspek kebudayaan.
 - c) Melaksanakan penelitian strategi kebudayaan Indonesia untuk 16 aspek kebudayaan yang proses pelaksanaannya sudah mencapai 50%.
 - d) Telah mencetak 30 judul buku hasil penelitian sebanyak 2.000 eksemplar, dan penyebarluasannya ke 628 lokasi di dalam dan luar negeri.
 - 3) Dalam rangka penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah:
 - a) Telah diadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah sebanyak 121 jenis (baru sebesar 40%), serta telah dibuat peta bahasa dialek Jakarta.
 - 4) Dalam rangka penelitian purbakala:
 - a) Penelitian dan analisis bidang pra sejarah di Pulau Komodo, Pulau Sumbawa, dan Camplong Nusa Tenggara Barat.

- b) Penelitian dan analisis bidang arkeologi klasik berupa studi ikonografi di Museum Nasional, ekskavasi di Kediri dan studi arsitektur di Jawa Tengah.
 - c) Penelitian dan analisis bidang arkeologi Islam di Banten Lama, tahap I dan II, studi naskah kuno Jawa Barat.
 - d) Penelitian yang sifatnya "resque program" di desa Mulyorejo Cepu.
 - e) Pertemuan Ilmiah Arkeologi III di Ciloto, simposium Van Heckeren I di Yogyakarta.
 - f) Penerbitan buku 4 judul.
- 5) Dalam rangka pengembangan kebijaksanaan kebudayaan:
- a) Penyusunan draft Repelita IV, Rancangan Bahan Nota Keuangan tahun 1984/1985, Proyeksi ketenagaan Repelita IV dan Kebijakan Teknis Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan.
 - b) Pengarahan pelaksanaan proyek tahun 1983/1984.
 - c) Pembuatan laporan tahunan 1982/1983.
- e. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 1) Telah dilaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahap kelima di 12 propinsi (daerah tingkat I sampai ke desa), dengan hasil:
 - a) Satu naskah buku pedoman inventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Terbentuknya anggota tim ineventarisasi di 11 propinsi sebanyak 236 orang.
 - c) Telah dilakukan pemberian pengarahan kepada ketua-ketua tim inventarisasi tanggal 19 sampai dengan 22 Mei 1983.
 - 2) Telah dapat diadakan komunikasi secara langsung:
 - a) Sarasehan dengan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa/HPK dan instansi yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan dan Medan dengan hasil dua naskah dengan peserta 100 orang.
 - b) Peningkatan kerja sama dengan instansi yang terkait dengan Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2 kali.
 - 3) Publikasi:
 - a) Publikasi melalui Radio, TVRI sebanyak 6 kali.
 - b) Penulisan dan pembahasan naskah yang disajikan 5 naskah menjadi 23 penyajian.
 - 4) Persiapan pelaksanaan studi kepustakaan, dengan membentuk tim penyusunan 3 orang.
- f. Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Teknis Kebudayaan.
- 1) Penataran tenaga teknis kebudayaan, 45 orang.
 - 2) Persiapan penataran dokumentasi kebudayaan.

2. Hambatan dan usaha penanggulangannya

a. Program Kepurbakalaan, Kesejarahan, dan Permuseuman

1) Hambatan:

- a) Masih adanya SIAP yang perlu penyelesaian segera sehingga menyita waktu untuk pekerjaan anggaran murni;
- b) Kurangnya tenaga teknis permuseuman yang terampil;
- c) Terbatasnya buku-buku referensi permuseuman;
- d) Kurang lancarnya arus komunikasi baik dari pusat maupun dari daerah;
- e) Masalah tanah di berbagai daerah menghadapi berbagai hambatan, di Aceh menunggu persetujuan Pangdam I Iskandar Muda, di Manado dan D.I. Yogyakarta ada kecenderungan beberapa Kepala Keluarga tidak mau pindah dengan ganti rugi yang disediakan;
- f) Bahan-bahan pemugaran (bahan perancah) yang dibutuhkan sulit di dapat;
- g) Kesulitan fasilitas pengangkutan/transportasi ke lokasi pemugaran yang letaknya di kaki perbukitan dan lain-lain;
- h) Persetujuan pencairan dana, revisi DIP/PO dan persetujuan kepanitiaan memerlukan waktu yang lama.

2) Usaha penanggulangannya.

- a) Memprioritaskan dan mempercepat penyelesaian kegiatan-kegiatan SIAP dengan suatu penjadwalan yang ketat;
- b) Peningkatan tenaga diusahakan dengan penataran dan menambah tenaga teknis permuseuman yang terampil;
- c) Mengusahakan pengadaan buku-buku referensi permuseuman;
- d) Meningkatkan arus komunikasi pusat dan daerah;
- e) Dalam memproses masalah pembebasan tanah diusahakan adanya suatu pendekatan yang luwes di samping mengusahakan penyelesaian dengan bantuan instansi-instansi yang berwenang. Di Aceh misalnya dengan perantara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diadakan pertemuan dengan Pangdam, di Yogyakarta dengan mengusahakan surat penetapan Gubernur dan di Manado diadakan pendekatan dengan Kepala Keluarga yang bersangkutan;
- f) Menghubungi pihak-pihak lain yang dapat membantu pengadaan bahan;
- g) Mendesak pengesahan persetujuan kepada pihak yang relevan.

b. Program Pengembangan Seni Budaya

1) Hambatan:

- a) Pengadaan peralatan dan fisik terlambat atau belum bisa dilaksanakan karena standardisasi bangunan dan DRM dari pemerintah daerah terlambat keluarnya;
- b) Sulitnya mencari lokasi dan proses pembebasan tanah;
- c) Terbatasnya (langkanya) barang yang akan dibeli sehingga perlu dengan melalui dispensasi/penunjukan langsung;
- d) Masih adanya tanda bintang dalam pengadaan fisik/peralatan sehingga perlu pencairan lebih lanjut.

2) Usaha penanggulangannya:

- a) Membina hubungan kerja sama yang baik dengan instansi-instansi yang relevan;
- b) Menghubungi rekanan sesuai dengan bidang-bidang pekerjaannya ;
- c) Mengajukan revisi dan pencairan ke pusat dan unit utama.

c. Program Kebahasaan, Kesastraan, Perbukuan, dan Perpustakaan:

1) Hambatan:

- a) Terbatasnya waktu dan tenaga penyunting serta tenaga teknis kebahasaan dan kesastraan;
- b) Pengadaan bahan pustaka bagi daerah tertentu mengalami kesulitan karena tidak ada toko buku atau penerbit yang dapat melayani sesuai dengan kebutuhan;
- c) Sarana operasional perpustakaan keliling belum memadai;
- d) Belum mantapnya sistem perpustakaan nasional sehingga tidak dapat sepenuhnya melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengenalan, dan pembinaan seluruh aparat;
- e) Terbatasnya tenaga khusus dalam ilmu perpustakaan.
- f) Dalam pengadaan buku Indonesia, sulit untuk mendapatkan judul buku baru untuk dibuatkan daftar buku yang akan dibeli;
- g) Kurangnya tenaga dalam pelaksanaan penyusunan katalog judul;
- h) Dalam menyusun bibliografi nasional tentang ASEAN untuk Pemerintah Republik Indonesia masih mengalami hambatan menunggu berita dari Malaysia tentang pelaksanaan otomasi.

- i) Kurangnya ruangan untuk pembuatan micro film/fis sehingga menghambat produksi;
 - j) Pengadaan tanah untuk perpustakaan wilayah.
- 2) Usaha penanggulangannya:
- a) Meningkatkan mutu tenaga penyunting melalui penataran;
 - b) Mengusahakan pendekatan dengan berbagai penerbit dan toko buku yang lengkap persediaannya;
 - c) Memanfaatkan sarana yang ada secara maksimal;
 - d) Mengusahakan terwujudnya undang-undang atau peraturan perpustakaan;
 - e) Mengadakan penataran dan pembibitan tenaga pustakawan;
 - f) Mengusahakan terwujudnya undang-undang wajib karya cetak;
 - g) Membentuk suatu hunting team untuk mencari data buku yang belum pernah dikirim;
 - h) Mengusahakan terwujudnya perekaman dengan komputer;
 - i) Mengusahakan pengambilan seluruh ruangan dari Pusat Pembinaan Perpustakaan;
 - j) Mengusahakan pendekatan dan kerja sama dengan instansi yang relevan.
- d. Program Inventarisasi Kebudayaan Nasional
- 1) Hambatan:
- a) Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti bila dibandingkan dengan luasnya bidang penelitian kebahasaan, penulisan sejarah nasional, kebudayaan daerah, dan bidang arkeologi;
 - b) Terdapatnya kegiatan yang dibintangi, sehingga pelaksanaannya menunggu persetujuan pencairan dananya;
 - c) Pengadaan tanah memerlukan proses yang lama dan melibatkan berbagai instansi;
 - d) Sulitnya transportasi ke lokasi penelitian terutama di luar pulau Jawa.
- 2) Usaha penanggulangannya:
- a) Memanfaatkan tenaga yang ada dan menyelenggarakan penataran dan berbagai latihan;
 - b) Mengusahakan pencairan dana ke pusat;
 - c) Membina kerja sama yang baik dengan instansi-instansi yang relevan;
 - d) Memanfaatkan sarana yang ada semaksimal mungkin.

e. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Hambatan:

- a) Belum adanya usulan-usulan tim inventarisasi dari Propinsi Riau;
- b) Belum adanya laporan hasil inventarisasi dari ketua-ketua tim inventarisasi di daerah;
- c) Kesulitan dalam memilih/memperoleh penulis yang berbobot;
- d) Pelaksanaan siaran untuk film/TVRI tidak lancar, karena jatah siaran bukan jatah untuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Usaha penanggulangannya:

- a) Mendesak ke daerah agar segera menyampaikan laporannya;
- b) Menghubungi pihak-pihak yang dapat membantu memperoleh penulis yang berbobot;
- c) Mengusahakan pendekatan dengan TVRI untuk memperoleh jatah waktu siaran.

f. Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Teknis Kebudayaan

1) Hambatan:

- a) Perlu adanya revisi DIP/PO;
- b) Perlu pencairan dana yang dibintangi.

2) Usaha penanggulangannya:

- a) Mendesak persetujuan usulan revisi dan pencairan dana.

BAB III
KEADAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA, KETENAGAAN
PERLENGKAPAN, ANGGARAN DAN LAIN-LAIN

A. ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai salah satu unit utama yang ada di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas departemen di bidang kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun pertama Repelita III (1979/1980) mengalami perubahan atau penyempurnaan sebagai langkah pengembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan volume tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan yang lebih sempurna dan menyeluruh sesuai tahapan pembangunan.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0/1975 tanggal 17 April 1975 yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 tahun 1974, Direktorat Jenderal Kebudayaan dibagi atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.
2. Direktorat Pembinaan Kesenian.
3. Direktorat Pengembangan Kesenian.
4. Direktorat Permuseuman.
5. Direktorat Sejarah dan Purbakala.

Di samping itu terdapat Pusat-pusat yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pusat-pusat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
2. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
3. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1978 khususnya mengenai pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1978 dibentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang masuk dalam jajaran direktorat-direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

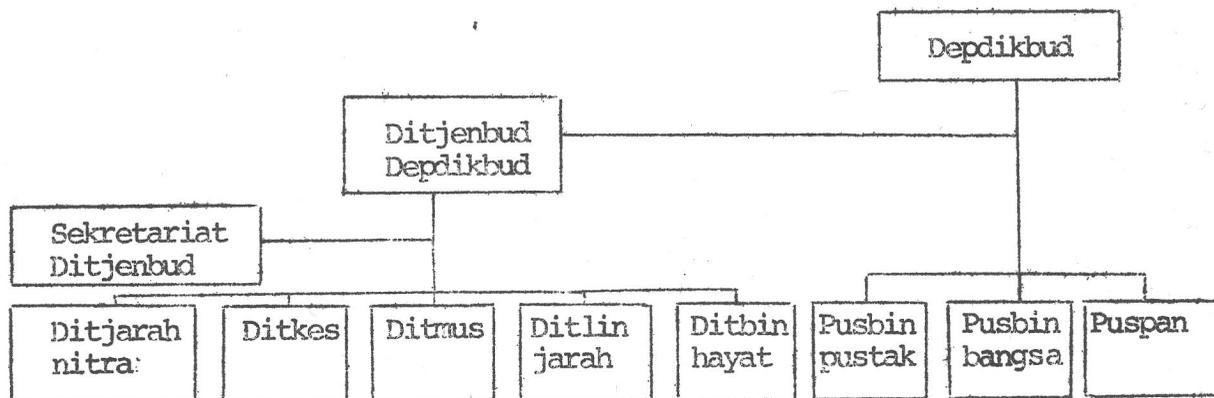
Selanjutnya secara berturut-turut susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan lagi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1978, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 47 tahun 1979, dan terakhir dengan lahirnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/0/1980 tanggal 11 September 1980 telah diatur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.
2. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
3. Direktorat Kesenian.
4. Direktorat Permuseuman.
5. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
6. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu terdapat satuan organisasi yang disebut Pusat. Pusat yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, adalah:

1. Pusat Pembinaan Perpustakaan.
2. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
3. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Bagan 1: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.



(Bagan: 1)

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta perijinan di bidang kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka yang menjadi sasaran utama pembinaan dan pengembangan kebudayaan, ialah:

1. Peningkatan persatuan dan kesatuan nasional dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam suku-suku bangsa, agama, budaya, dan kepercayaan.
2. Pembinaan integritas nasional
3. Pembinaan masyarakat yang bersifat terbuka dan demokratis.

Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan disusun instansi vertikal yang disebut Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, yang merupakan penyelenggara tugas dan fungsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi dan bertanggung-jawab langsung kepada Menteri.

Kantor Wilayah mempunyai Bidang Kesenian dan Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di daerah.

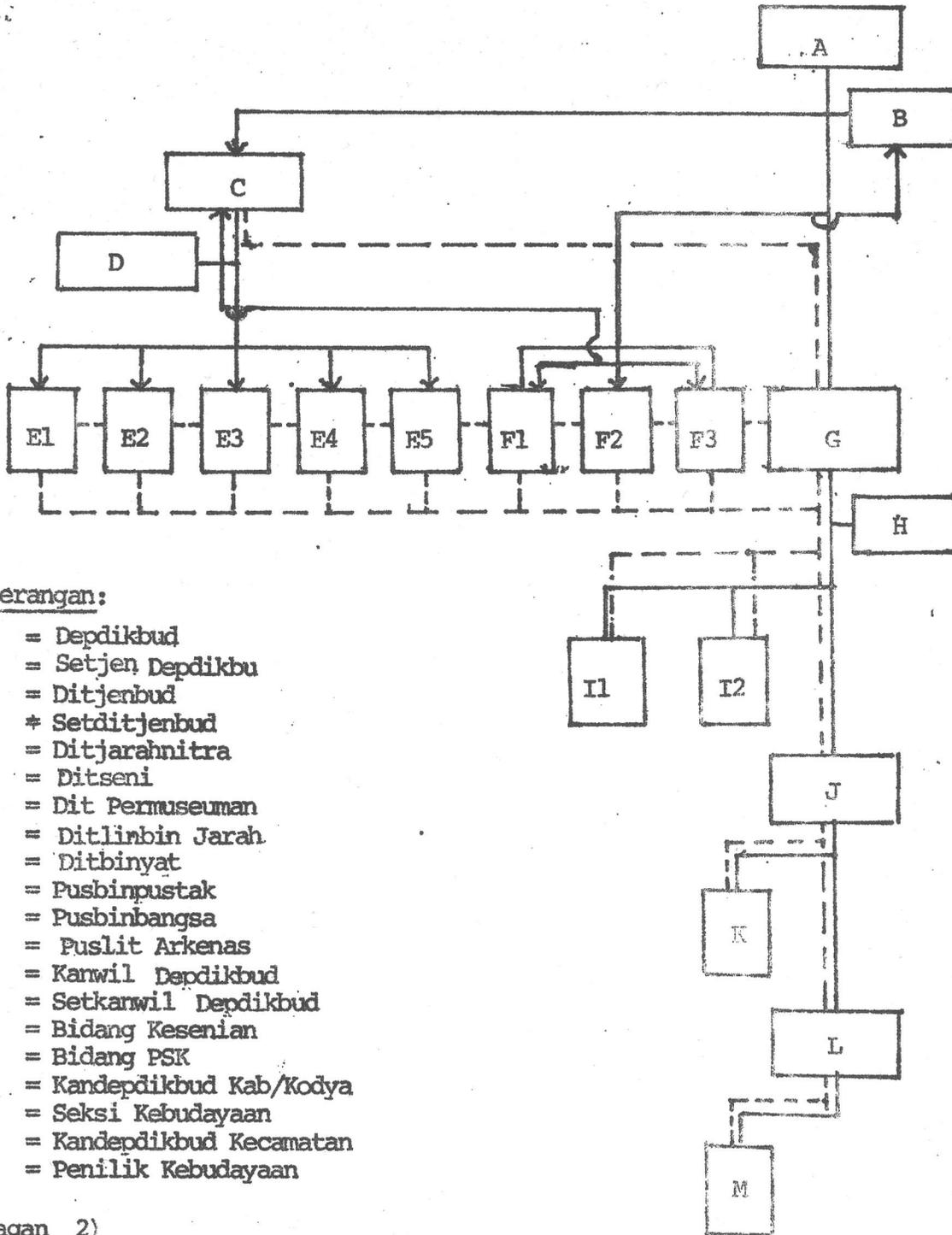
Memperhatikan susunan organisasi bidang-bidang di Kantor Wilayah dibandingkan dengan direktorat-direktorat di Pusat yang menangani pembinaan dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, jelas tidak proporsional mengingat luasnya bentangan cakrawala jangkauan pembinaan dan pengembangan

kebudayaan di daerah yang menuntut penggarapan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, masalah ini masih perlu mendapat perhatian dan pemikiran lebih lanjut, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan kebudayaan di daerah dapat ditangani sebagaimana yang diharapkan.

Demikian juga halnya di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya. Untuk tingkat ini terdapat Seksi Kebudayaan.

Pada tingkat Kecamatan yang merupakan aparat terdepan di bidang kebudayaan yang menangani pembinaan dan pengembangan kebudayaan ialah Penilik Kebudayaan. Penilik Kebudayaan bukan merupakan satuan organisasi, tetapi merupakan tenaga pelaksana dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.

Bagan 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Instansi Vertikalnya.

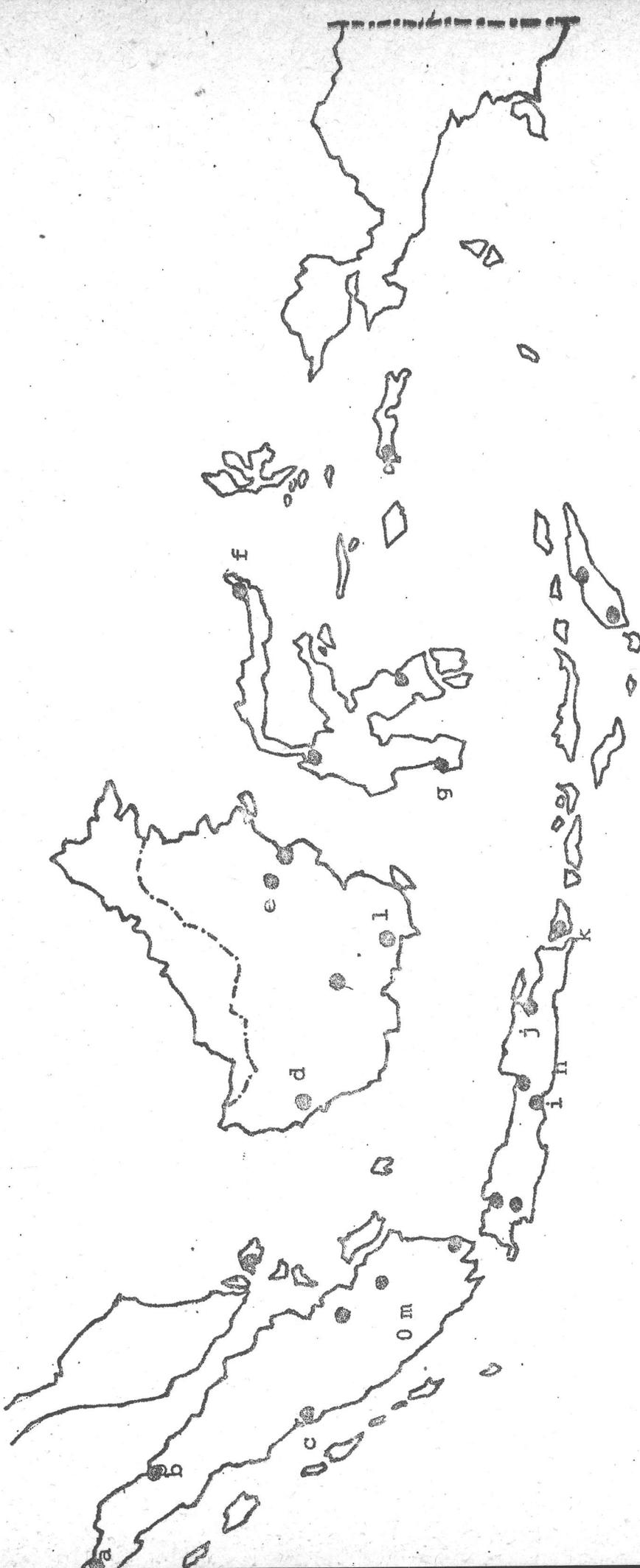


(Bagan 2)

Kecuali itu di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat 9 jenis UPT (Unit Pelaksana Teknis) sebagai berikut:

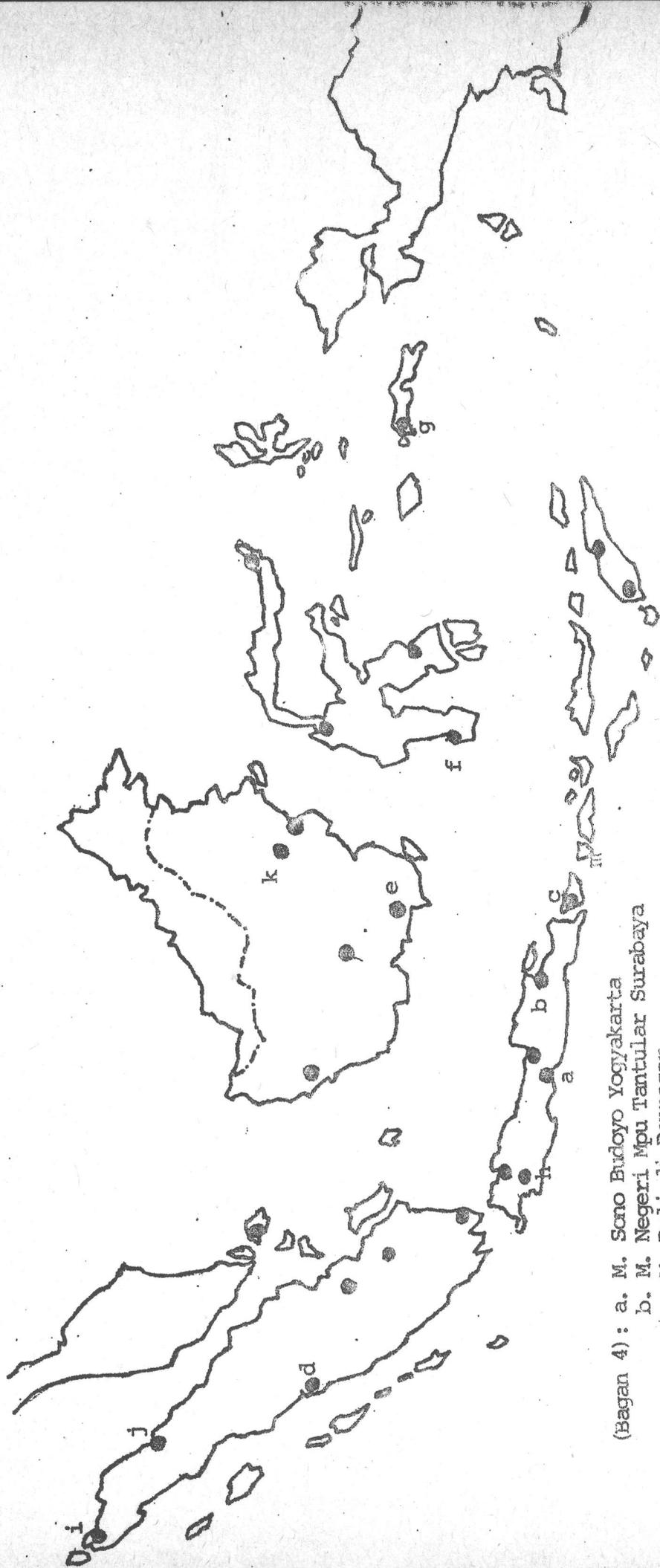
1. Museum Nasional, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Mei 1979 No. 092/0/1979.
2. Perpustakaan Nasional, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Mei 1980 No. 0164/0/1980 ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan mengintegrasikan:
 - a. Perpustakaan Museum Nasional;
 - b. Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial;
 - c. Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta;
 - d. Bidang Bibliografi dan Deposit di Pusat Pembinaan Perpustakaan.
3. Taman Budaya ada 13 buah dan pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Agustus 1978 No. 0276/0/1978 dan tanggal 3 Agustus 1982 No. 0249/0/1982. (Bagan 3).
4. Museum Negeri Propinsi ada 12 buah dan pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Mei 1979 No. 093/0/1979, No. 022/0/1982 tanggal 21 Januari 1982, dan No. 0134/0/1982 tanggal 17 April 1982 (Bagan 4).
5. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala ada 5 buah dan pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Juli 1978 No. 0200/0/1978 (Bagan 5).
6. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional ada 2 buah dan pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 April 1981 No. 0140/0/1981 (Bagan 6).
7. Balai Penelitian Bahasa ada 3 buah dan pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Agustus 1978 No. 0272/0/1978 (Bagan 7).
8. Perpustakaan Wilayah/Propinsi ada 25 buah dan pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222g/0/1980 (Bagan 8).
9. Balai Arkeologi ada 2 buah dan pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Juni 1978 No. 0207/0/1978 (Bagan 9).

PEMA LOKASI TAMAN BUDAYA (12 buah)



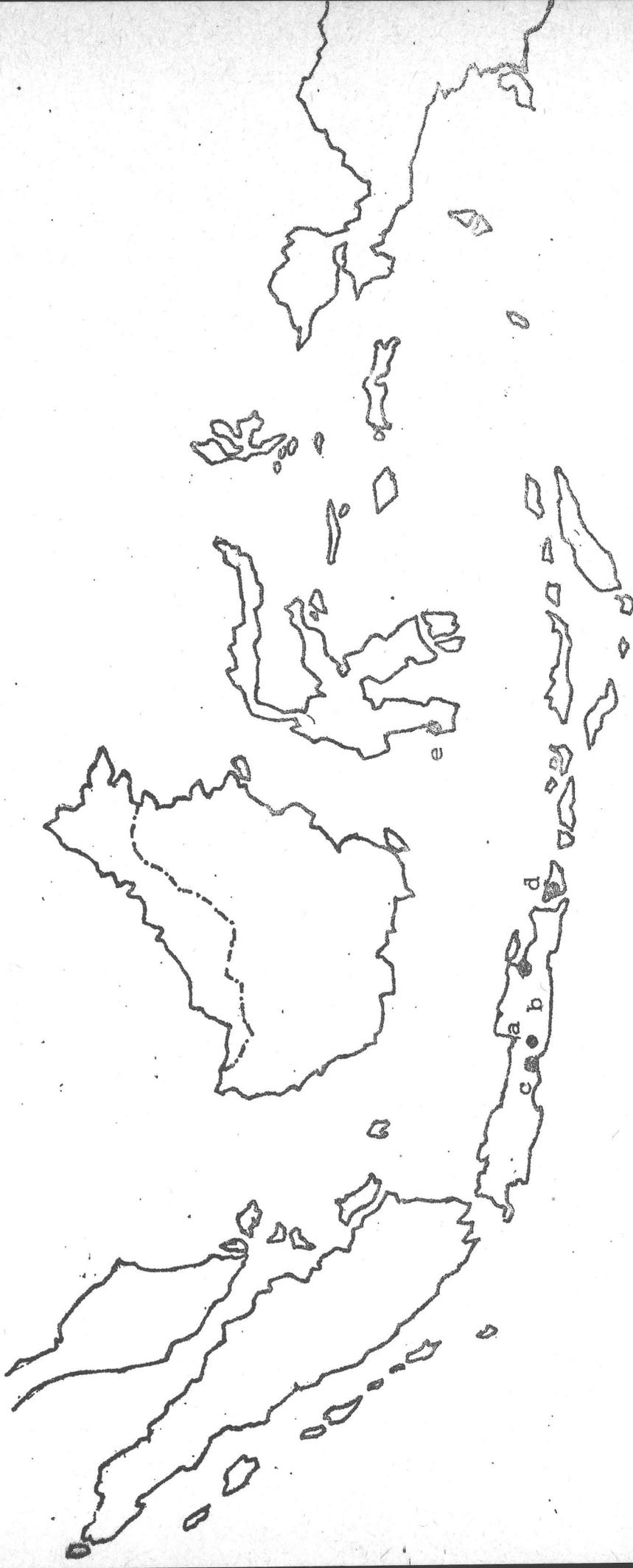
- (Bagan 3) : a. T.B. Banda Aceh
b. T.B. Medan
c. T.B. Padang
d. T.B. Pontianak
e. T.B. Samarinda
f. T.B. Manado
g. T.B. Ujungpandang
h. T.B. Surakarta
i. T.B. D.I. Yogyakarta
j. T.B. Surabaya
k. T.B. Denpasar
l. T.B. Kalimantan Selatan
m. T.B. Bengkulu

PEETA LOKASI MUSEUM NEGERI PROPINSI (13 buah)



- (Bagan 4) :
- a. M. Sero Budoyo Yogyakarta
 - b. M. Negeri Mpu Tantular Surabaya
 - c. M. Bali di Denpasar
 - d. M. Negeri Adityawaman di Padang
 - e. M. Negeri Lambung Mangkurat di Banjarbaru
 - f. M. Negeri La Galigo di Ujungpandang
 - g. M. Negeri Siwa Lima di Ambon
 - h. M. Negeri Jawa Barat di Bandung
 - i. M. Negeri Aceh di Banda Aceh
 - j. M. Negeri Propinsi Sumatra Utara
 - k. M. Negeri Mulawaman di Tenggarong
 - l. M. Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat

PETA LOKASI SUKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA (5 Buah).



- a. Suka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah di Prambanan
- b. Suka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur di Mojokerto
- c. Suka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Yogyakarta di Bogen
- d. Suka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali di Gianyar
- e. Suka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan di Ujungpandang.

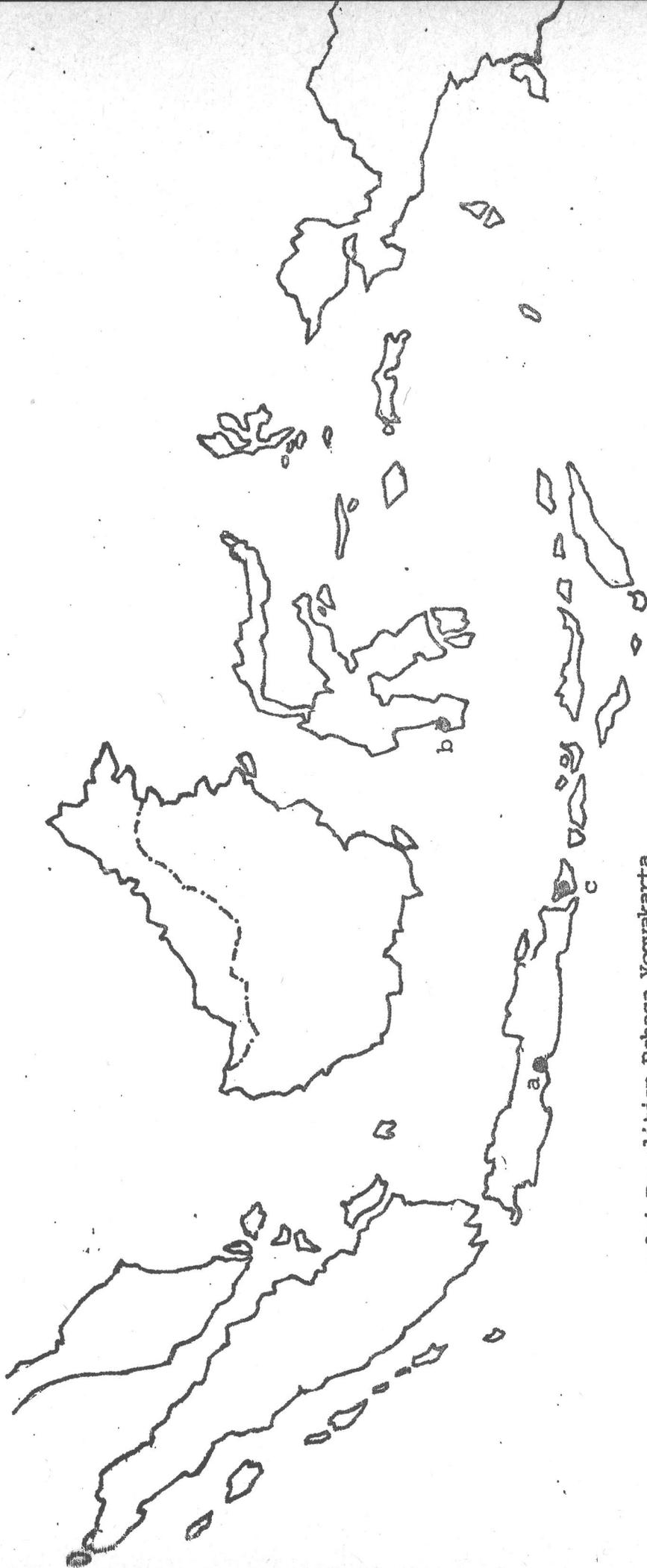
(Bagan 5).

PETA LOKASI BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL (2 buah)



- a. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
 - b. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan di Ujungpandang.
- (Bagan 6).

PETA LOKASI BALAI PENELITIAN BAHASA (3 buah)



- a. Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
- b. Balai Penelitian Bahasa Sulawesi Selatan di Ujungpandang
- c. Balai Penelitian Bahasa Bali di Singaraja

(Bagan 7)

PETA LOKASI BALAI ARKEOLOGI (2 buah)



- a. Balai Arkeologi Yogyakarta,
- b. Balai Arkeologi Bali di Denpasar.

(Bagan 8)

PEETA LOKASI PERPUSTAKAAN WILAYAH (25 buah)



- a. PW. Banda Aceh
- b. PW. Medan
- c. PW. Padang
- d. PW. Pekanbaru
- e. PW. Palembang
- f. PW. Palangkaraya
- g. PW. Banjarmasin
- h. PW. Samarinda
- i. PW. Ujung Pandang
- j. PW. Manado
- k. PW. Ambon
- l. PW. Kupang
- m. PW. Mataram

- n. PW. Singaraja
- o. PW. Surabaya
- p. PW. Semarang
- q. PW. Yogyakarta
- r. PW. Bandung
- s. PW. Jambi
- t. PW. Bengkulu
- u. PW. Tanjung Karang
- v. PW. Pontianak

- w. PW. Palu
- x. PW. Kendari
- y. PW. Jayapura

(Bagan 9)

Untuk menjalin dan membina kerja sama antara Kantor Wilayah dengan Unit Pelaksana Teknis telah dirumuskan pedoman koordinasi antara kantor wilayah dengan Unit Pelaksana Teknis, Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.12624/Sekj/Dpk/A/1982 tanggal 2 Pebruari 1982.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur serta Kepala Bagian/Sub Direktorat masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan serta dengan instansi lain di luar Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyusun laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Para Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal menyusun laporan Direktorat Jenderal.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada masing-masing bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.

B. KETENAGAAN

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.079/0/1975 dan No.0222e/0/1980, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini dilakukan oleh Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Sesuai dengan keputusan-keputusan itu, maka unsur tenaga yang merupakan salah satu faktor penting sebagai pengelola dalam suatu organisasi selalu diadakan pengadaannya secara bertahap dan sesuai dengan peraturan; kepegawaian yang berlaku. Dengan demikian Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai unit organisasi wajib melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian yang menjadi tugasnya sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan keperluan.

2. Fungsi

Adapun fungsi bagian kepegawaian sebagaimana diterapkan dalam pasal 12 surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan, penerimaan, pengangkatan, dan pemindahan pegawai.
- b. Merencanakan pengembangan pegawai.
- c. Mengurus pemberhentian dan pensiunan pegawai.

3. Sasaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi itu sasaran di bidang ketenagaan yang ingin dicapai adalah:

- a. Pembinaan pegawai
- b. Pengembangan pegawai
- c. Pengadaan pegawai.

Adapun sasaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan pegawai

Pada dasarnya adalah kegiatan administrasi kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku agar pembinaan karier yang bersangkutan dapat terjamin.

Dalam tahun anggaran 1983/1984 telah dapat diselesaikan proses pengangkatan pegawai negeri sipil sejumlah 160 orang, pengangkatan pejabat pimpinan sejumlah 32 orang, pelantikan pejabat pimpinan sejumlah 49 orang (termasuk pusat-pusat), pemberian tunjangan jabatan pimpinan sejumlah 326 orang, peninjauan masa kerja sejumlah 3 orang, kenaikan pangkat sejumlah 269 orang, (18 orang diapelkan), penyesuaian ijasah sejumlah 22 orang, kenaikan gaji berkala sejumlah 209 orang, pemberian cuti (besar, menjelang pensiun, tahunan, hamil - alasan penting) sebanyak 49 orang dan permintaan KARPEG 125 orang (2 orang diapelkan).

2. Pengembangan Pegawai

Kegiatan pengembangan mengarah kepada peningkatan ketrampilan dan memperluas cakrawala pengetahuan pegawai yang bersangkutan agar lebih mampu melaksanakan tugasnya. Untuk bidang ini, telah dilaksanakan kegiatan latihan pra jabatan sejumlah 76 orang (peserta 83 orang lulus sejumlah 76 orang, tidak lulus 7 orang) ujian dinas tingkat I dan II sejumlah 56 orang (peserta 65 orang, lulus 56 orang tidak lulus 9 orang) dan penugasan pendidikan latihan SESPA sejumlah 1 orang. Tugas belajar: Dalam Negeri nihil, Luar Negeri sejumlah 19 orang. Penugasan pendidikan/latihan (diklat) sebanyak 39 orang.

3. Pengadaan pegawai.

Bidang ini diharapkan untuk memperkecil masalah kekurangan tenaga dengan proses pengadaan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam tahun anggaran 1983/1984 telah dapat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: Pengangkatan pegawai baru tahun 1982/1983 termasuk sisa tahun 1981/1982 sejumlah 129 orang (36 diapelkan).

4. Keadaan Ketenagaan.

Keadaan tenaga di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang terdiri dari tenaga ditingkat Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di daerah pada periode tahun anggaran 1983/1984 sampai dengan bulan September 1983 seluruhnya berjumlah 3.203 orang, tidak termasuk tenaga bidang-bidang pada Kantor Wilayah berikut aparat vertikalnya sampai dengan tingkat Kecamatan. (Sumber data Bagian Kepegawaian Set Ditjen).

Secara keseluruhan jumlah tenaga tersebut terdiri atas:

golongan I 1.345 orang, golongan II 1.479 orang, golongan III 342 orang
golongan IV 35 orang.

Sedang berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

- Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi (Sarjana) 213 orang;
- Tingkat Pendidikan Sarjana Muda 343 orang;
- Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.233 orang;
- Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 551 orang; dan
- Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar 863 orang.

Dari golongan-golongan ini dapat dibagi-bagi berdasarkan unit kerjanya:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 269 orang;
- b. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional berjumlah 98 orang;
- c. Direktorat Kesenian berjumlah 207 orang;
- d. Direktorat Permuseuman berjumlah 80 orang;
- e. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala berjumlah 110 orang;
- f. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjumlah 42 orang;
- g. Museum Nasional, berjumlah 108 orang;
- h. Perpustakaan Nasional, berjumlah 194 orang;
- i. Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, berjumlah 57 orang;
- j. Taman Budaya, berjumlah 427 orang;
- k. Museum Negeri Propinsi, berjumlah 544 orang;
- l. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, berjumlah 1.067 orang;

Ketenagaan pada pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di daerah berjumlah:

- a. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan (Balai Arkeologi Bali, Yogyakarta) berjumlah 144 orang;
- b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berjumlah 339 orang.
- c. Pusat Pembinaan Perpustakaan dan Perpustakaan Wilayah di Daerah berjumlah 1.015 orang;

Jika dikelompokan menurut jenjang pendidikan dari seluruh jumlah tenaga itu, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Tenaga yang berpendidikan tingkat sarjana berjumlah 15,41 %
- b. Tenaga yang berpendidikan tingkat sarjana muda berjumlah 13,07%
- c. Tenaga yang berpendidikan tingkat menengah atas berjumlah 47,16%
- d. Tenaga yang berpendidikan tingkat pendidikan menengah pertama 111,67%
- e. Tenaga yang berpendidikan tingkat pendidikan dasar sejumlah 12%
- f. Tenaga yang tidak memiliki ijazah berjumlah 0,66%

5. Unit Pelaksana Teknis.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dikenal 9 jenis unit pelaksana teknis (UPT) yaitu sebagai berikut:

- a. Taman Budaya (13 UPT).
- b. Museum Negeri Propinsi (12 UPT).
- c. Museum Nasional.
- d. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (5 UPT).
- e. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (2 UPT).
- f. Balai Penelitian Bahasa (3 UPT).
- g. Perpustakaan Nasional.
- h. Perpustakaan Wilayah/Propinsi (25 UPT).
- i. Balai Arkeologi (2 UPT).

Keadaan tenaga pada unit pelaksana teknis tahun 1983/1984 adalah sebagai berikut:

1. Taman Budaya golongan I 172 orang, golongan II 212 orang, golongan III 40 orang, golongan IV 3 orang.
2. Museum Negeri Propinsi, golongan I 237 orang, golongan II 255 orang, golongan III 48 orang dan golongan IV 4 orang.
3. Museum Nasional, golongan I 28 orang, golongan II 55 orang, golongan III 24 orang dan golongan IV 1 orang.
4. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala golongan I 665 orang, golongan II 391 orang, golongan III 11 orang, golongan IV kosong.
5. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional golongan I 9 orang, golongan II 28 orang, golongan III 20 orang, golongan IV kosong.

6. Balai Penelitian Bahasa golongan I 23 orang, golongan II 34 orang, golongan III 26 orang, dan golongan IV 3 orang.
7. Perpustakaan Wilayah/Propinsi golongan I 286 orang, golongan II 611 orang, golongan III 104 orang, dan golongan IV 14 orang.
8. Perpustakaan Nasional golongan I 42 orang, golongan II 124 orang, golongan III 27 orang, dan golongan IV 1 orang.
9. Balai Arkeologi golongan I 6 orang, golongan II 26 orang, golongan III 11 orang.

Hambatan

Pengadaan kebutuhan tenaga teknis menghadapi beberapa hambatan antara lain:

- a. Minat para lulusan sekolah menengah dan lebih-lebih dari perguruan tinggi (sarjana) untuk menjadi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan relatif rendah.
- b. Formasi yang diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan tiap tahun relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan beban tugas yang makin meningkat.

Usaha penanggulangan

- a. Menambah tenaga di bidang kebudayaan, baik kualitas maupun kuantitas dengan menitik beratkan pada penerimaan, pemilihan dan penyaringan pegawai yang lebih mantap dengan persyaratan yang disesuaikan dengan kondisi kebudayaan (titikberatkan pada tenaga teknis).
- b. Mengadakan pendekatan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan di bidang ilmu sosial, guna memperoleh tenaga yang diperlukan.
- c. Membuka kesempatan penyelenggaraan pendidikan, mencangkokan tenaga dari pendidikan tinggi yang sesuai dengan lapangan kerja yang ada pada Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- d. Membuka kesempatan bagi tenaga teknis guna memperluas cakrawala pandangan dengan melalui sistem magang.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga melalui pendidikan/latihan, penataran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- f. Menyelenggarakan tugas belajar ke luar negeri, dengan menggunakan bantuan dana dan memanfaatkan tenaga ahli ke luar negeri.

Usaha peningkatan

Dalam menghadapi tugas yang makin meningkat baik jumlah maupun jenis kegiatan yang diemban, Direktorat Jenderal Kebudayaan berusaha lebih meningkatkan kualitas tenaga yang ada dengan cara, tugas belajar, baik dalam maupun di luar negeri, penataran tenaga teknis, penyelenggaraan kursus-kursus, pencangkakan dan lain-lain.

Usaha ini dilakukan terus menerus disesuaikan dengan kemampuan dan fasilitas yang ada. Dengan harapan bahwa dikemudian hari akan lebih mampu menghadapi dan menangani tugas yang dibebankan dan telah menjadi tanggung jawabnya.

Masalah

Masalah yang belum dapat diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah penyusunan standardisasi kualifikasi untuk ketenagaan teknis, beberapa faktor yang menghambat penyusunan perumusan itu antara lain, sebagaimana besar kegiatan teknis (kecuali bidang kesenian) belum didukung oleh pendidikan kejuruan, khusus bagi tenaga teknis, dalam pelaksanaannya.

Dan pada tingkat perguruan tinggi, bidang kebudayaan dikategorikan sebagai jurusan langka, sedangkan dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian Direktorat Jenderal Kebudayaan belum didukung oleh tenaga peneliti yang memadai.

Penilik Kebudayaan

Di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang merupakan satuan organisasi vertikal dari Kantor Wilayah di Propinsi dikenal kantor departemen pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/kotamadya, dan apabila jalur vertikal tersebut lebih jauh ditarik ke tingkat kecamatan terdapat kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.

Untuk menangani tugas-tugas pembinaan dan pengembangan kebudayaan dikenal penilik kebudayaan yang bukan merupakan satuan organisasi, tetapi merupakan tenaga pelaksana kantor kecamatan yang bersangkutan.

Dari 27 provinsi di seluruh Indonesia terdapat 3.402 kecamatan dan berdasarkan data laporan yang masuk jumlah tenaga penilik kebudayaan, adalah sebagai berikut:

- a. Jawa Barat dengan penilik kebudayaan sebanyak 149 orang dan Kepala Seksi Kebudayaan 10 orang dari 404 kecamatan, bukan termasuk jumlah kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
- b. Jawa Tengah dengan penilik kebudayaan sebanyak 49 orang dan Kepala Seksi Kebudayaan sebanyak 1 orang dari 480 kecamatan, bukan jumlah kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
- c. D.I. Yogyakarta dengan penilik kebudayaan sebanyak 21 orang, dan Kepala Seksi Kebudayaan 5 orang dari 76 kecamatan.
- d. Jawa Timur dengan penilik kebudayaan sebanyak 205 orang dan kepala seksi kebudayaan 19 orang dari 547 kecamatan, bukan jumlah kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
- e. D.I. Aceh dengan penilik kebudayaan sebanyak 72 orang dan kepala seksi kebudayaan 10 orang, dari 131 kecamatan, bukan jumlah kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
- f. Sumatra Utara, dengan penilik kebudayaan sebanyak 161 orang dan kepala seksi kebudayaan 17 orang dari 190 kecamatan bukan jumlah kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan
- g. Sumatra barat dengan penilik kebudayaan sebanyak 76 orang dan kepala seksi kebudayaan 20 orang dari 92 kecamatan bukan jumlah kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
- h. Jambi dengan penilik kebudayaan sebanyak 26 orang dan kepala seksi kebudayaan 22 orang dari 39 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- i. Sumatra Selatan dengan penilik kebudayaan 70 orang dan kepala seksi kebudayaan 15 orang dari 85 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan
- j. Lampung dengan penilik kebudayaan sebanyak 3 orang dan kepala seksi kebudayaan 6 orang dari 71 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.

- k. Kalimantan Barat dengan penilik kebudayaan sebanyak 40 orang dan kepala Seksi kebudayaan 7 orang dari 106 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- l. Kalimantan Tengah dengan penilik kebudayaan sebanyak 67 orang dan kepala seksi kebudayaan 6 orang dari 82 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- m. Kalimantan Selatan dengan penilik kebudayaan sebanyak 84 orang dan kepala Seksi kebudayaan 10 orang dari 89 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan
- n. Kalimantan Timur dengan penilik kebudayaan sebanyak 28 orang dan kepala seksi kebudayaan 6 orang dari 69 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- o. Sulawesi Utara dengan penilik kebudayaan sebanyak 45 orang dan kepala seksi kebudayaan 4 orang dari 83 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- p. Sulawesi Tengah dengan penilik kebudayaan sebanyak 66 orang dan kepala seksi kebudayaan 4 orang dari 66 kecamatan.
- q. Sulawesi Selatan dengan penilik kebudayaan sebanyak 21 orang dan kepala seksi kebudayaan 6 orang dari 172 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- r. Sulawesi Tenggara dengan penilik kebudayaan sebanyak 42 orang dan kepala seksi kebudayaan 4 orang dari 44 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan;
- s. Maluku dengan penilik kebudayaan sebanyak 56 orang dan kepala seksi kebudayaan 5 orang dari 63 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- t. Bali dengan penilik kebudayaan sebanyak 40 orang dan kepala seksi kebudayaan 6 orang dari 51 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- u. Nusa Tenggara Barat dengan penilik kebudayaan sebanyak 42 orang dan kepala seksi kebudayaan 6 orang dari 56 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- v. Nusa Tenggara Timur dengan penilik kebudayaan sebanyak 96 orang dan kepala seksi kebudayaan 12 orang dari 108 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.

- w. Irian Jaya dengan penilik kebudayaan sebanyak 10 orang dan kepala seksi kebudayaan 34 orang dari 118 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- x. Bengkulu dengan penilik kebudayaan sebanyak 17 orang dan kepala seksi kebudayaan 1 orang dari 23 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.
- y. DKI Jakarta dengan penilik kebudayaan sebanyak 30 orang dan kepala Seksi kebudayaan 5 orang dari 30 kecamatan.
- z. Riau dengan penilik kebudayaan sebanyak 2 orang dari 67 kecamatan bukan jumlah kantor departemen pendidikan dan kebudayaan kecamatan.

Sehubungan dengan data-data yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa tenaga penilik kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun anggaran 1983/1984 berjumlah 1.512 orang dengan kepala seksi kebudayaan sebanyak 241 orang.

Propinsi yang belum mengirimkan masukan data mengenai tenaga penilik kebudayaan adalah Timor Timur, sedangkan Kepala Seksi Kebudayaan adalah Riau dan Timor Timur.

Memperhatikan masukan data mengenai tenaga penilik kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang ada, menyebabkan belum dapat diketahui secara menyeluruh jumlah tenaga penilik kebudayaan pada semua kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Oleh karena itu dapat diajukan saran sebagai berikut:

Untuk dapat menekan kekurangan tenaga penilik kebudayaan sekecil mungkin, kiranya selalu dapat ditempuh pelbagai usaha dengan selalu memberikan masukan permasalahannya sebagai laporan berkesinambungan.

Sebagai penjelasan dari uraian ketenagaan tersebut di atas, tercantum lampiran data ketenagaan kepegawaian.

REKAPITULASI Data Ketenagaan Set Ditjen Kebudayaan
Direktorat dan Pusat di lingkungan
Ditjen Kebudayaan, UPT Pusat dan Daerah
Keadaan pada tanggal 30 September 1983.

NO.	COL. I			COL. II			COL. III				COL. IV					JUMLAH	KETERANGAN		
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	18	18	19	21	49	49	25	17	20	9	8	10	1	3	1*	-	-	269/2	* jab. rangkap.
2.	6	3	4	4	6	9	8	7	21	9	8	6	1	3	3	-	-	98	
3.	5	9	12	17	29	44	31	19	12	4	15	3	2	3	-	-	-	207/2	
4.	5	5	3	14	13	16	2	2	6	5	3	5	-	-	-	1	-	80	
5.	4	11	1	1	37	22	7	5	7	1	3	-	3	1	-	-	-	110	
6.	8	4	-	-	11	5	-	1	3	2	3	2	2	-	-	-	1*	42	* Peg. Bulanan
7.	21	13	4	7	59	39	16	6	28	29	12	10	2	3	1	2	1	253	
8.	10	17	4	5	48	33	17	7	5	7	8	3	2	3	-	-	-	169	
9.	7	5	1	-	39	11	12	2	8	17	2	1	2	2	2	1	-	101	
10.	5	7	5	11	28	20	3	4	7	8	3	6	1*	-	-	-	-	108/1	
11.	8	15	6	13	76	34	8	6	10	10	3	3	3	4	-	-	-	194	
12.	4	1	2	2	5	5	13	5	8	9	2	1	-	-	-	-	-	57	
13.	81	89	1	1	146	47	9	10	15	13	5	7	1	41	2	-	-	472	
14.	102	119	8	8	158	66	22	19	22	17	6	3	1	1	2	-	-	544	
15.	271	308	67	36	303	130	20	7	10	11	3	5	-	3	1	-	-	1.067	
16.	9	11	1	2	17	8	6	4	12	12	1	-	-	-	-	-	2	86	
17.	95	116	26	13	284	143	55	24	31	27	15	8	8	1	-	-	-	846	
18.	-	-	-	6	-	-	26	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	43	
	659	751	164	161	1018	681	278	135	225	191	325	84	27	25	12	4	4	4.746/5	

NO.	PENDIDIKAN							KETERANGAN
	S	SM	SLTA	SLTP	SD	ASD		
	20	21	22	23	24	25	26	
1.	21	19	92	55	82	-		
2.	36	19	20	6	17	-		
3.	9	26	97	28	47	-		
4.	9	16	23	9	23	-		
5.	14	17	59	12	8	-		
6.	10	5	15	5	7	-		
7.	88	49	71	24	18	4		
8.	24	18	97	9	14	-		
9.	21	8	59	5	7	-		
10.	21	9	45	9	24	-		
11.	16	27	104	15	32	-		
12.	13	13	20	1	10	-		
13.	21	64	214	90	83	-		
14.	30	78	207	106	123	-		
15.	13	56	366	221	414	-		
16.	27	9	26	11	10	3		
17.	54	105	428	121	130	3		
18.	11	-	26	6	-	-		
	449	530	1971	741	1042	10		

DATA: Ketenagaan Bidang PSK dan Bidang Kesenian, Kasi Kebudayaan
dan Penilik Kebudayaan

No.	Propinsi	Bid. PSK		Jml	Bid. KES		Jml	Seksi Keb.		Jml	Penilik KEB		Keterangan	
		Kabid	Staf		Kabid	Staf		Kasi	Staf		Pen.	Staf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	DKI Jakarta	1	2	3	1	3	4	5	-	5	30	-	30	
2.	Jawa Barat	1	3	4	1	3	4	10	8	18	149	-	149	
3.	Jawa Tengah	1	3	3	1	3	4	1	5	6	49	-	49	
4.	D.I. Yogyakarta	1	3	3	1	76	77	5	-	5	21	-	21	
5.	Jawa Timur	1	3	3	1	3	4	19	-	19	205	-	205	
6.	D.I. Aceh	1	41	42	1	22	22	10	-	10	72	-	72	
7.	Sumatera Utara	1	2	3	1	3	4	17	-	17	161	-	161	
8.	Sumatera Barat	1	3	4	1	36	37	20	22	42	70	-	70	
9.	Riau	1	14	15	1	3	4	-	-	-	2	-	2	
10.	Jambi	1	3	4	1	25	26	22	-	22	26	-	26	
11.	Sumatera Selatan	1	28	29	1	20	21	15	-	15	70	-	70	
12.	Lampung	1	32	33	1	3	4	6	-	6	3	-	3	
13.	Kalimantan Barat	1	2	3	1	3	4	7	-	7	40	-	40	
14.	Kalimantan Tengah	1	3	4	1	3	4	6	-	6	67	-	67	
15.	Kalimantan Selatan	1	3	4	1	16	17	10	-	10	84	-	84	
16.	Kalimantan Timur	1	3	4	1	3	4	6	-	6	28	-	28	
17.	Sulawesi Utara	1	3	4	1	3	4	4	-	4	45	-	45	
18.	Sulawesi Tengah	1	51	52	1	41	42	4	-	4	66	-	66	
19.	Sulawesi Selatan	1	3	4	1	3	4	6	-	6	21	-	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	Sulawesi Tenggara	1	3	4	1	2	3	4	-	4	42	-	42	
21.	Maluku	1	3	4	1	3	4	5	-	5	56	-	56	
22.	B a l i	1	14	15	1	3	4	6	-	6	40	-	40	
23.	Nusa Tenggara Barat	1	3	4	1	12	13	6	9	15	42	10	52	
24.	Nusa Tenggara Timur	1	3	4	1	17	18	12	-	12	96	-	96	
25.	Irian Jaya	1	20	21	1	3	4	34	-	34	10	-	10;	
26.	Bengkulu	1	3	4	1	3	4	1	-	1	17	-	17	
27.	Timor Timur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	26	246	272	26	315	341	241	35	236	1512	10	1512	

C. PERLENGKAPAN

Yang termasuk perlengkapan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dari satuan organisasi Pusat dan Daerah berupa: gedung, tanah, wisma, rumah dinas, peralatan mesin/teknis, mebiler, alat komunikasi, alat kesenian, koleksi, perpustakaan dan mobilitas.

Perincian dari masing-masing komponen tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Gedung tempat pelaksanaan kegiatan meliputi 32 buah bangunan tersebar di seluruh tanah air dengan luas 79.385,80 m².
2. Tanah dimana gedung berada, meliputi 32 lokasi dengan luas tanah 389.196,54 m².
3. Wisma, seluas 13.665 m² sebanyak 18 buah bangunan di 2 lokasi.
4. Rumah dinas, sebanyak 34 buah dengan luas bangunan 760 m² di 2 lokasi.
5. Peralatan mesin dan teknis sebanyak 3.631 unit/set/buah.
6. Peralatan meubiler sebanyak 15.041 buah/set/unit.
7. Peralatan komunikasi sebanyak 194 buah/unit.
8. Peralatan kesenian sebanyak 8.595 buah/set.
9. Koleksi sebanyak 25.917 buah.
10. Perpustakaan sebanyak 113.400 buah.
11. Mobilitas 382 buah roda dua, dan roda empat.

Perincian dari pada perlengkapan yang diuraikan di atas tercantum dalam lampiran.

DAFTAR INVENTARISASI

NO.	UNIT KERJA/KOM- PONEN	GEDUNG M2	TANAH M2	WISMA	RUANG DINAS	PERALAT- AN/ME- SIN	PERALAT- AN MO- BILER	ALAT KOMUNI- KASI	ALAT KESE- NIAN	KOLEKSI	PERPUS- TAKAAN	MOBILI- TAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Set Ditjen :Bud.	6140 M2	4800 M2	6665 M2	1	449	1202	11	-	-	2261 exp	65	
2.	Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional	-	-	-	-	75	356	2	-	-	3666	54	
3.	Dit. Kesenian	6454 M2	7164 M2	7000 M2	11	108	1164	5	3748	8392	-	18	
4.	Dit. Permuseum	1830 M2	3220 M2	-	-	139	539	2	-	63	-	9	
5.	Dit. Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Se- jarah & Purbakala	384 M2	-	-	-	217	394	2	-	-	1450	25	
6.	Dit. Pembinaan Peghayat Keper- cayaan Terhadap Tuhan YME.	-	-	-	-	46	119	1	-	-	1213	13	7
7.	Pusat Pembinaan Perpustakaan	2300	12000	-	-	580	825	32	-	-	-	7	
8.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	2550 M2	4600 M2	-	-	406	1321	2	-	-	-	8	
9.	Pusat Penelitian Arkeologi Nas.	3500 M2	4500 M2	-	-	88	577	165	-	-	11 topik /2988	5	
10.	Perpustakaan Nas.	-	-	-	-	-	-	-	2679	-	-	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Museum Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Balai Kajian Seni nitra.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.1. Yogyakarta	575	1810	1	-	66	236	6	44	-	7034	1	
	12.2. Sul - Sel	642	-	-	-	31	53	-	-	-	533	2	
13.	Taman Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.1. Banda Aceh	2793	20080	-	-	90	175	3	70	-	483	2	
	13.2. Medan	152	8520	-	-	58	540	2	420	-	750	4	
	13.3. Pontianak	-	1030	-	-	30	25	7	36	-	270	3	
	13.4. Samarinda	1051	26000	-	-	10	300	1	10	-	-	3	
	13.5. Manado	*)	28400	-	-	40	385	2	40	-	-	2	
	13.6. Ujung Pandang	275	30000	-	-	25	110	7	30	-	580	3	
	13.7. Surabaya	6000	10400	-	-	20	40	2	-	-	270	2	
	13.8. Denpasar	9628	44690	3	-	60	540	4	10	-	1170	2	
14.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Pur- bakala.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.1. Bali	140	3725	-	-	60	270	5	-	80	4400	2	
15.	Museum Negeri Pro pinsi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.1. Sono Budoyo	3474	6867	-	-	40	710	14	210	2000	45000	4	
	15.2. Adityawarman	2858	42272	1	-	50	700	2	-	600	3600	4	
	15.3. Mpu Tantular	1508	4549	1	-	70	300	6	1 set*	6252	5300	4	
	15.4. La Galigo	5503	-	-	-	40	600	12	2 unit	2160	240	2	
	15.5. Siwa Kuno	2014	3200	-	-	50	610	3	-	4200	3400	7	
	15.6. D.I. Aceh	2687	9238	1	-	30	70	10	-	100	250	2	
	15.7. Sun -- Ut	8167	10000	10	-	90	220	16	-	1520	3000	2	
	15.8. N, T. B.	2489	10600	-	-	30	60	1	-	110	100	2	
16.	Balai Penelitian Bahasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16.1. Yogyakarta	217	1600	-	-	39	200	10	-	-	-	2	
	16.2. Sul - Sel	420	1140	-	-	25	180	2	2	-	3210	1	
	16.3. Bali	951	990	-	-	25	160	2	-	-	3400	1	

*) masih menem-
pati gedung
Kenwil Dep.
Dikbud

* gamelan

Daftar Inventarisasi Perpustakaan Wilayah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jawa Barat	722	1100	-	-	90	440	-	-	-	29184	1	-
3.	Jawa Tengah	625	1349	-	-	-	-	-	-	-	43698	-	-
4.	DI Yogyakarta	2448	3084	-	-	75	820	-	-	-	97989	2	-
5.	Jawa Timur	504	920	-	-	130	320	-	-	-	33150	1	-
6.	D.I. Aceh	650	5348	-	-	35	290	-	-	-	25632	5	-
7.	Sumatra Utara	1600	3575	-	-	-	-	-	-	-	24799	-	-
8.	Sumatra Barat	650	10000	-	-	50	3012	-	-	-	30977	-	-
9.	Riau	248	3000	-	-	-	-	-	-	-	24703	-	-
10.	Jambi	95	2305	-	-	25	125	-	-	-	9426	1	-
11.	Sumatra Selatan	120	120	-	-	25	250	-	-	-	5093	1	-
12.	Lampung	142	2500	-	-	40	215	-	-	-	32540	1	-
13.	Kalimantan Barat	36	-	-	-	15	130	-	-	-	5073	1	-
14.	Kalimantan Tengah	650	2770	-	-	-	-	-	-	-	23284	-	-
15.	Kaliman. Selatan	525	1635	-	-	25	230	-	-	-	4775	3	-
16.	Sulawesi Utara	480	3000	-	-	85	235	-	-	-	44822	2	-
17.	Kalimantan Timur	360	1915	-	-	35	800	-	-	-	26900	2	-
18.	Sulawesi Tengah	420	10000	-	-	-	-	-	-	-	5571	-	-
19.	Sulawesi Selatan	500	508	-	-	50	310	-	-	-	35985	1	-
20.	Sulawesi Tenggara	150	2500	-	-	15	130	-	-	-	8738	1	-
21.	Maluku	400	1203	-	-	-	-	-	-	-	36913	-	-
22.	Bali	379	-	-	-	-	-	-	-	-	19684	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	Nusa Tenggara Barat	200	1500	-	-	40	280	-	-	-	24984	2	
24.	Nusa Tenggara Timur	277	2250	-	-	20	370	-	-	-	2288	1	
25	Irian Jaya	-	5500	-	-	10	70	-	-	-	3600	1	
26,	Bengkulu	54	2411	-	-	20	160	-	-	-	26685	1	
27.	Timor Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	12235	68493	-	-	795	5475	-	-	-	626493	29	

D. ANGGARAN

1. Rutin

Anggaran rutin Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk tahun anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp3.875.149.000,00
Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program kerja berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan didukung oleh 3 program rutin yaitu:

a. Program Pendidikan Aparatur Pemerintah.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp18.983.000,00 untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan/latihan dinas, seperti:

- 1) Pembinaan pegawai
- 2) Pengembangan Pegawai
- 3) Pengadaan pegawai.

b. Program Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp3.856.166.000,00 untuk menunjang kegiatan:

- 1) Administrasi umum
- 2) Penyelenggaraan Pembinaan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Penyelenggaraan Pembinaan Museum dan Kepurbakalaan.

c. Program Penelitian Aparatur Pemerintahan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dikemukakan di atas, sesuai dengan fungsi dan tugasnya dapat dilaksanakan oleh satuan organisasi:

a. Pusat:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan dana sebesar Rp485.173.000,00 terserap Rp217.073.320,00
- 2) Direktorat Kesenian dengan dana sebesar Rp485.114.000,00 terserap Rp155.338.500,00

- 3) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan dana sebesar Rp418.165.000,00 terserap Rp82.306.850,00
- 4) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp61.276.797,00 terserap Rp34.542.797,00
- 5) Direktorat Permuseuman dengan dana sebesar Rp322.807.000,00 terserap Rp79.421.061,00
- 6) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dengan dana sebesar Rp129.586.927,00 terserap Rp78.594.927,00

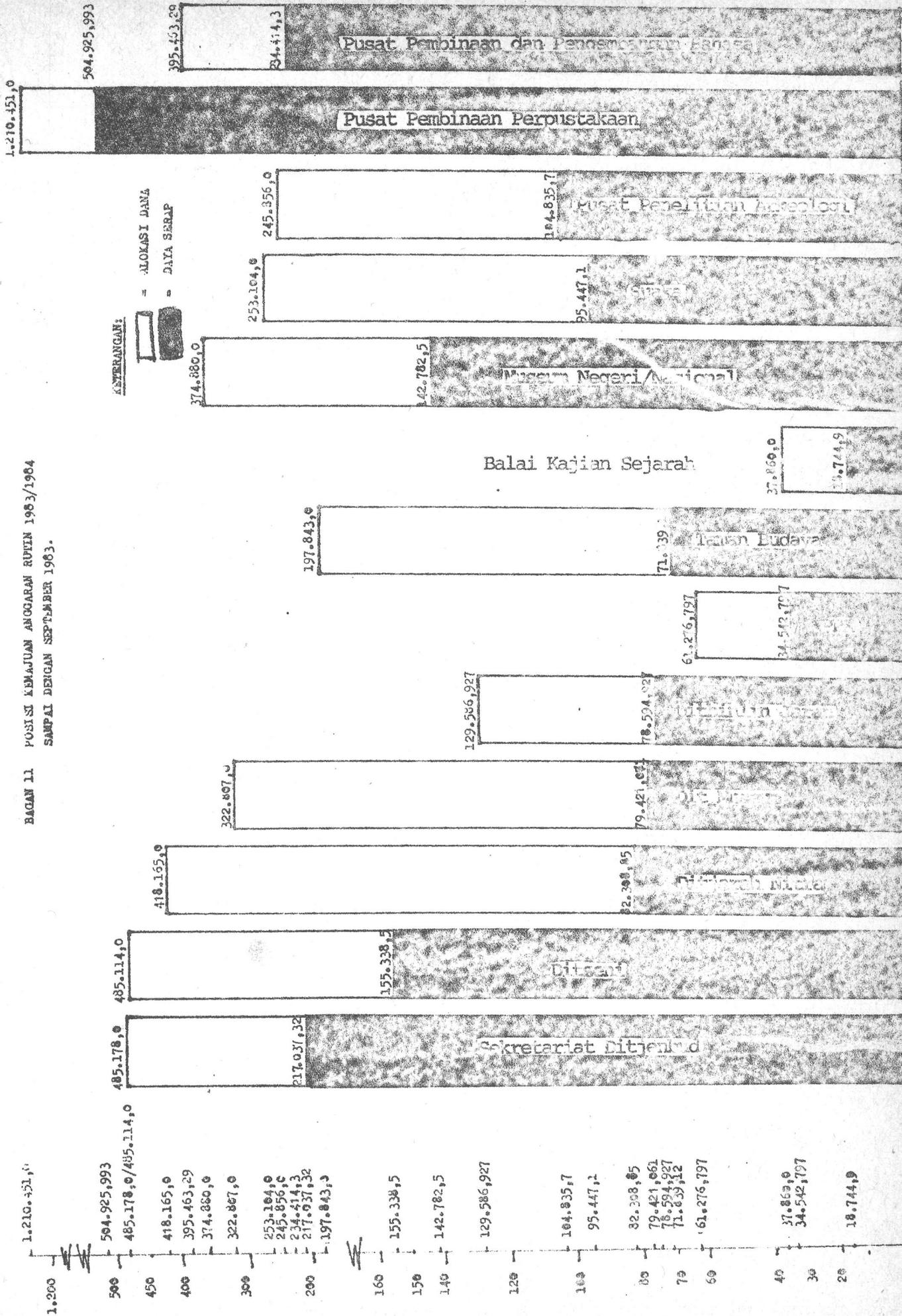
b. Daerah

- 1) Taman Budaya 13 lokasi dengan dana sebesar Rp197.843.000,00 terserap Rp71.839.120,00
- 2) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 2 lokasi dengan dana sebesar Rp37.860.000,00 terserap Rp18.744.900,00
- 3) Museum Negeri 13 lokasi dengan dana sebesar Rp374.880.000,00 terserap Rp142.782.500,00
- 4) Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala 5 lokasi dengan dana sebesar Rp253.104.000,00 terserap Rp95.447.100,00

Selain satuan organisasi yang dikemukakan di atas, dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan masih terdapat pusat-pusat yang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan serta bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan UPT di daerah yaitu Balai Arkeologi 2 lokasi (Yogyakarta dan Bali) dengan dana sebesar Rp245.856.000,00 terserap Rp104.835.700,00
 2. Pusat Pembinaan Perpustakaan dan Perpustakaan Wilayah 26 lokasi dengan dana sebesar Rp1.210.451.000,00 terserap Rp504.925.993,00
 3. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Balai Penelitian Bahasa 3 lokasi dengan dana sebesar Rp395.463.290,00 terserap Rp234.414.300,00
- Sebagai penjelasan uraian tersebut dapat dilihat pada (Bagan 11) grafik Anggaran Rutin Direktorat Jenderal Kebudayaan 1983/1984.

BAGIAN II POSISI KEMAJUAN ANGGARAN RUTIN 1983/1984 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 1983.



2. Pembangunan

Anggaran pembangunan Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk tahun anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp 21.097.603,6 yang digunakan untuk mendukung 5 program pembangunan dengan kegiatan-kegiatannya yang disusun berdasarkan kebijaksanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1983/1984.

Ditinjau dari segi jumlah anggaran bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 26.832.355,0 berarti penurunan sebesar 21,37 % dan dipergunakan dalam menunjang kelima program pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Kepurbakalaan, Kesejarahan, dan Permuseuman

Dana yang mendukung program ini sebesar Rp 5.321.005,0 yang terbagi dalam beberapa jenis proyek yaitu:

1) Proyek Pengembangan Permuseuman

Proyek ini meliputi 26 propinsi dan 1 buah di pusat. Dana yang mendukung proyek ini sebesar Rp 2.377.365,0 dan sampai dengan saat ini (September 1983) sudah terserap sebesar Rp 519.361,566 atau 21,85 % dari kegiatan antara lain: survai pengadaan koleksi tingkat Kabupaten (Dati II), fungsionalisasi museum dalam bentuk kegiatan renovasi tata ruang penyajian di 17 buah lokasi Museum Propinsi, menyelenggarakan pameran keliling dan pameran khusus di 22 lokasi museum propinsi, penyusunan dan membuat katalog koleksi, membantu 32 museum daerah di 13 propinsi, menyelenggarakan transkripsi, melaksanakan penerbitan buku, pengadaan tanah, melanjutkan pembangunan gedung museum, rehabilitasi, studi teknik dan pengadaan peralatan kantor/teknis.

2) Proyek Pengembangan Museum Nasional

Dana yang disediakan untuk proyek ini sebesar Rp 82.500.000,- untuk mendukung kegiatan antara lain: survai pengembangan museum nasional, pemfungsian museum melalui museum keliling, pameran khusus, pembinaan tenaga teknis permuseuman, heregistrasi dan reinventarisasi, studi perbandingan koleksi, perawatan koleksi, penyusunan dan penulisan naskah, publikasi dan penerbitan buku, pengadaan sarana penunjang untuk mendukung pembinaan proyek, sampai dengan saat ini (September 1983) telah terserap dana sebesar Rp 31.500.000,- atau sekitar 38,15 %.

- 3) Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Dana yang disediakan untuk proyek ini sebesar Rp 2.591.940,0 untuk mendukung kegiatan proyek-proyek pusat dan daerah antara lain: untuk studi kelayakan, registrasi dan dokumentasi serta penyuluhan peninggalan sejarah dan purbakala, penelitian cagar budaya, pemfungsian sasana budaya, pemugaran, pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala, dan pendidikan SATPAM dan sampai dengan saat ini (September 1983) sudah terserap Rp 752.291,221 atau sebesar 29,02 %.
- 4) Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Monumen Nasional
Proyek ini merupakan kegiatan baru yang didukung oleh dana sebesar Rp 1.287.350,0 dan sampai dengan saat ini (September 1983) sudah terserap Rp 90.000,0 atau sebesar 7 % digunakan untuk kegiatan studi teknis pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi tentang segi-segi fisik pembangunan Monumen Nasional, pemugaran, serta pengadaan sarana penunjang antara lain berupa pembelian satu unit accu/dinamo untuk penggerak lift.
- 5) Proyek Konservasi Candi Borobudur
Proyek ini merupakan lanjutan Proyek Pemugaran Candi Borobudur yang didukung dengan dana sebesar Rp 270.000.000,- dan sampai saat ini (September 1983) sudah terserap sebesar Rp 53.331.800,00 atau sebesar 19 75 % untuk menunjang kegiatan konservasi batu candi 7.500 m³ dan pengadaan peralatan teknis sebanyak 4 unit.

b. Program Pengembangan Seni Budaya

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.411.915,0 dipergunakan untuk:

1) Proyek Pengembangan Kesenian

Proyek Pengembangan Kesenian pusat dan daerah dengan dana sebesar Rp 4.242.915,0 dan sampai dengan saat ini (September 1983) dana yang tersedia sudah terserap sebesar Rp 617.108,0 atau sebesar 14,55 % untuk mendukung kegiatan antara lain: pencatatan data kesenian, peningkatan aktivitas organisasi kesenian, peningkatan mutu, pengamatan dan penilaian lomba tingkat daerah, lomba tingkat nasional, sayembara bidang seni tingkat propinsi, Komisi Peneliti dan Penilai Kegiatan Kesenian dan Hiburan Dalam Rangka Hubungan Luar Negeri di daerah (KPPD)

yang menjangkau 26 propinsi, peningkatan apresiasi serta masyarakat, pertunjukan di 26 propinsi, pameran di 26 propinsi, pekan seni tingkat nasional, duta seni antar propinsi dan pembinaan sosio drama melalui pekan sosio drama tingkat Kabupaten/Kotamadya di 26 propinsi, serta pengadaan sarana penunjang berupa prasarana fisik, sarana peralatan untuk Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan daerah transmigrasi.

2) Proyek Wisma Seni Nasional

Proyek ini merupakan kegiatan lanjutan dengan dana sebesar Rp 177.000,0 guna mendukung kegiatan inventarisasi dan pembebasan tanah, evaluasi rencana induk dan perencanaan pengelolaan wisma seni nasional, konservasi koleksi, dan pengadaan sarana. Hingga saat ini (Triwulan II) dalam pelaksanaan proyek sudah terserap dana sebesar Rp 22.685.000,- atau sebesar 12,82 %.

c. Program Kebahasaan, Kesastraan, Perbukuan, dan Perpustakaan

Program ini didukung dengan dana sebesar Rp 6.685.339,0 digunakan untuk membiayai proyek pusat maupun proyek daerah.

1) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

Proyek ini merupakan proyek lanjutan dengan dana Rp 398.000,0 untuk menunjang kegiatan antara lain: bimbingan administrasi dan teknis yang dilaksanakan melalui rapat kerja penyusunan kamus bahasa Indonesia dan daerah, penyusunan buku acara sebanyak 2 judul, menyelenggarakan sayembara mengarang dalam bahasa dan sastra Indonesia dan daerah untuk guru sekolah dasar, bekerja sama kebahasaan Indonesia-Malaysia, rapat kerja kebahasaan/sidang majelis bahasa Indonesia/Malaysia, studi kelayakan, dan persiapan komputerisasi. Pada saat ini dana yang sudah terserap oleh proyek dalam pelaksanaan operasional sebesar Rp 369.649.000,00 atau sebesar 92,88 %.

2) Proyek Pengembangan Perpustakaan

Proyek ini merupakan proyek lanjutan yang tersebar di pusat dan daerah dengan dana yang mendukungnya Rp 5.072.807.700,- dan sampai dengan saat ini untuk operasional proyek telah terserap dana sebesar Rp 220.467.442,- atau sebesar 4,35 % untuk menunjang kegiatan pengadaan bahan pustaka (untuk melengkapi perpustakaan wilayah, perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah dan perpustakaan kecamatan), bibliografi daerah (untuk perpustakaan wilayah dan perpustakaan umum).

Pengadaan sarana penunjang meliputi pengadaan tanah untuk pendirian gedung perpustakaan wilayah, rehabilitasi, pengadaan rumah jabatan, pembelian gedung lama bagi perpustakaan, pengadaan peralatan kantor dan teknis.

Khusus untuk kegiatan di pusat diperuntukan mendukung kegiatan antara lain survai evaluasi, pemantapan pola sistem perpustakaan, penilaian pustaka hadiah negara asing, bantuan kepada organisasi profesi dalam bidang penerbitan.

Selain itu bagi pembinaan kegiatan badan perbukuan nasional serta peningkatan pelayanan perpustakaan seperti persiapan pendirian perpustakaan di wilayah Timor Timur, bantuan bahan pustaka bagi Pusat Pendidikan dan Latihan Perpustakaan, penyusunan dan pengadaan buku-buku petunjuk dan penyuluhan, usaha pemasyarakatan pengetahuan dan peranan perpustakaan melalui TVRI, RRI, pameran Hardiknas dan sayembara perpustakaan daerah tingkat II dan pengadaan sarana penunjang bagi perpustakaan di Dilli Timor Timur.

3) Proyek Pengembangan Perpustakaan Nasional

Proyek ini merupakan proyek lanjutan dengan dana sebesar Rp 303.554.000,-. Dana ini untuk mendukung kegiatan rekatalogisasi empat komponen perpustakaan nasional dalam bentuk pola sejenis, pengadaan bahan pustaka asing, penyusunan dan penerbitan berbagai jenis informasi, pembuatan perencanaan gedung perpustakaan nasional, pembebasan/pengosongan tanah dan pengadaan peralatan kantor untuk operasional proyek. Sampai dengan saat ini dana yang tersedia sudah terserap mencapai Rp 29.460.000,- atau sebesar 9,7 %.

4) Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan Umum dan Profesi

Proyek ini merupakan proyek lanjutan dengan didukung oleh dana sebesar Rp 168.830.000,- dan sampai saat ini dana yang tersedia untuk menunjang proyek ini sudah terserap sebesar Rp 27.208.000,- atau sebesar 16,12 % untuk menunjang kegiatan pengadaan majalah tingkat SD, SMP/SMFA dan Perguruan Tinggi, sayembara mengarang bacaan populer dan pengadaan peralatan kantor untuk operasional proyek.

5) Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah

Proyek ini merupakan proyek lanjutan yang ditunjang oleh dana sebesar Rp 133.200.000,- dan sampai saat ini dana yang tersedia untuk menunjang kegiatan proyek ini sudah terserap sebesar Rp 67.595.000,- atau sebesar 50,75 % untuk kegiatan perekaman naskah pra seleksi, seleksi naskah, penulisan naskah dan dokumentasi, pencetakan dan distribusi serta pengadaan peralatan kantor serta dalam rangka operasional, pembelian naskah.

6) Proyek Media Kebudayaan

Proyek ini merupakan proyek lanjutan yang didukung dana sebesar Rp 534.875.000,- untuk menunjang kegiatan berupa pembuatan film dan copy film 16 mm, pembuatan album seni budaya, buku wisata budaya, booklet, pembuatan ceritera bergambar, program kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pariwisata, Direktorat Jenderal RIF dalam bentuk KPP Wisata Budaya, koordinasi siaran dan sensor KPP.

Sampai dengan saat ini sudah terserap dana sebesar Rp 187.234.500 atau sebesar 35 %.

d. Program Inventarisasi Kebudayaan Nasional

Program ini ditunjang oleh dana sebesar Rp 3.984.130.000,-
Proyek ini tersebar baik di pusat maupun di daerah

1) Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah

Proyek ini merupakan proyek lanjutan satu di pusat dan 26 di daerah dengan dana sebesar Rp 1.795.800,0 untuk menunjang antara lain kegiatan perekaman, penganalisaan, penyusunan naskah, penyempurnaan sampai dengan editing naskah kebudayaan seluruh Indonesia.

Sampai saat ini sudah terserap dana sebesar Rp 677.936.219,- atau sebesar 37,75 %.

2) Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Proyek ini merupakan proyek lanjutan yang didukung dengan dana sebesar Rp 675.000.000,- sampai dengan saat ini sudah terserap dana sebesar Rp 334.417.895,- atau sebesar 59,54 % untuk menunjang kegiatan penyusunan/ penyempurnaan dan penyuntingan naskah, bibliografi, naskah biografi tokoh nasional, pahlawan nasional, dan sejarah perlawanan kolonialisme dan imperialisme, sejarah sosial daerah, menterjemahkan naskah asing, penyusunan petunjuk penelitian dan penulisan, peningkatan mutu penulisan, mengadakan seminar/pertemuan sejarawan dan pengadaan/penerbitan.

3) Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

Proyek ini merupakan proyek lanjutan yang didukung oleh dana sebesar Rp 557.500.000,- dan sampai saat ini dana yang tersedia sudah terserap sebesar Rp 252.278.780,- atau sebesar 45,25 % untuk menunjang kegiatan penelitian dan penyusunan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah satu proyek pusat dan 15 proyek berlokasi di daerah.

Evaluasi hasil penelitian tahun-tahun sebelumnya dan penelitian tahap pertama di daerah, penerbitan dan penyebaran naskah ke instansi pemerintah dan swasta, serta pengadaan sarana penunjang untuk pusat dan daerah.

4) Proyek Penelitian Purbakala

Proyek ini merupakan proyek lanjutan yang didukung oleh dana sebesar Rp 718.704.713,- dan sampai saat ini dana yang tersedia sudah terserap sebesar Rp 214.957.860,- atau sebesar 29,91 % untuk kegiatan penelitian purbakala yang meliputi: penelitian pra sejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam, penelitian paleoekologi dan radiometri, penelitian paleoantropologi, penelitian arkeometri, pengadaan pertemuan ilmiah dan evaluasi hasil penelitian, mengadakan dokumentasi, pameran hasil penelitian, serta penerbitan naskah, pengadaan sarana penunjang, pengadaan rumah dinas, penyelesaian gedung dan pengadaan peralatan laboratorium di Pejaten, penelitian purbakala di Bandung, pengadaan perlengkapan gedung laboratorium paleoekologi radiometri.

5) Proyek Pembinaan Teknis dan Pengembangan Kebijakan Kebudayaan

Proyek ini ditunjang dengan dana sebesar Rp 365.150.000,- Dana ini untuk mendukung kegiatan koordinasi proyek-proyek subsektor kebudayaan, satuan biaya proyek-proyek subsektor kebudayaan, pengolahan dana dan informasi kebudayaan, penyesuaian program kerja tahun terakhir Pelita III dan penyusunan laporan, penyusunan rencana induk pembinaan dan pengembangan kebudayaan Repelita IV dan pengadaan sarana penunjang.

Sampai dengan saat ini dana yang tersedia sudah terserap sebesar Rp 91.287.500,- atau sebesar 25 %.

e. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Program ini didukung oleh dana sebesar Rp 246.545.000,- dan sampai saat ini dana yang tersedia pada proyek sudah terserap sebesar Rp 63.410.500,- atau sebesar 25,72 % untuk menunjang Proyek Inventarisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kegiatan antara lain inventarisasi dan dokumentasi studi kepustakaan, sarasehan, rakernas kepercayaan, rapat-rapat tingkat Kabupaten mengenai kepercayaan dalam rangka bimbingan dan koordinasi dengan instansi yang relevan, publikasi naskah, penyebaran informasi melalui TVRI, RRI dan media massa, pengadaan sarana penunjang untuk operasional proyek.

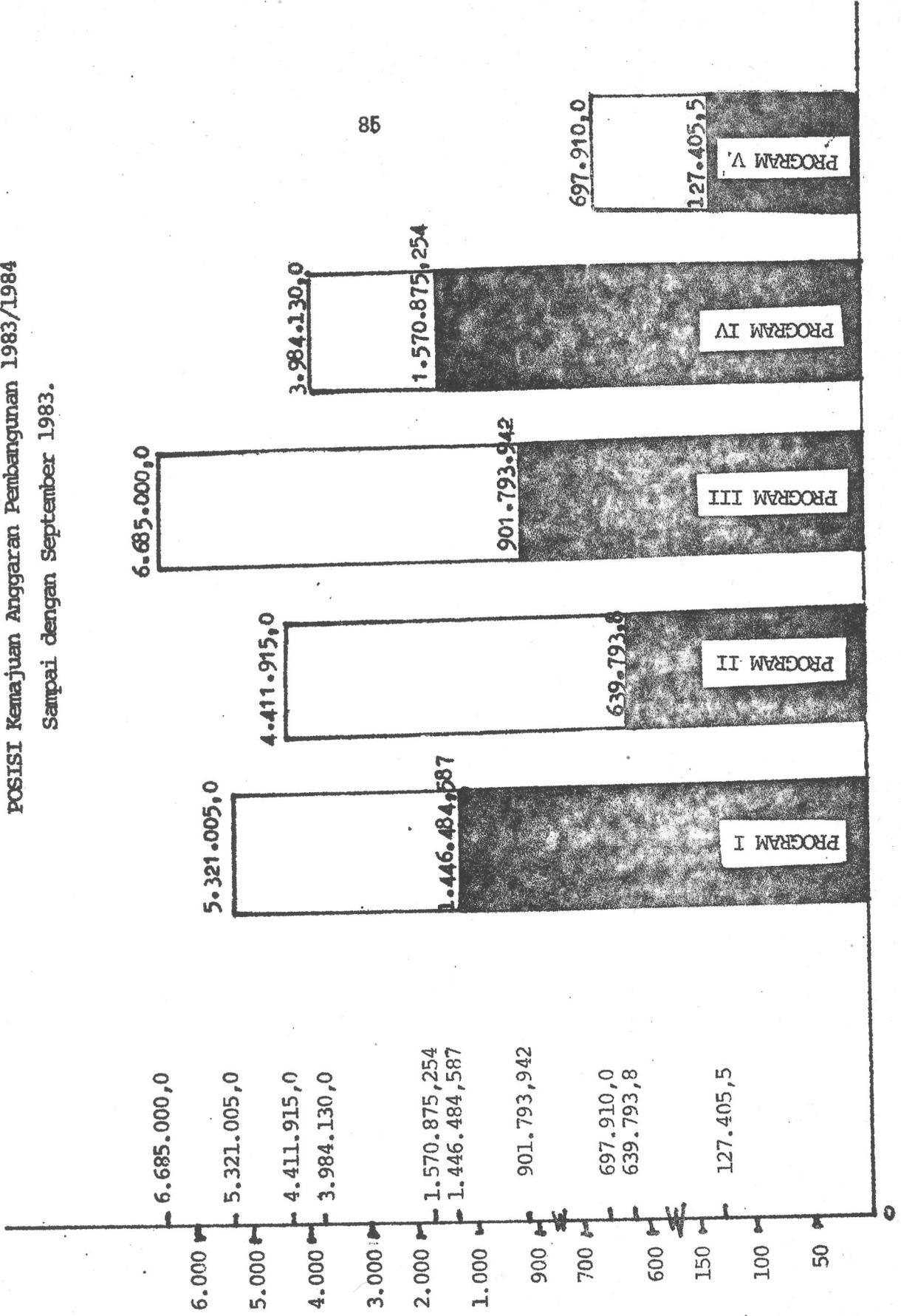
Di samping kelima program tersebut di atas, terdapat Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Teknis Kebudayaan yang berada di dalam Program Pendidikan, Geberasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Proyek ini ditunjang oleh dana sebesar Rp 433.365.000,- diperuntukkan untuk menunjang kegiatan penataran yaitu: penataran penilik kebudayaan, tenaga penyunting bahasa, tenaga dokumentasi dan informasi, tenaga teknis kesejarahan dan nilai tradisional, tenaga teknis kesenian, tenaga teknis permuseuman, tenaga teknis kepurbakalaan dan kesejarahan, restorasi dan konservasi, tenaga teknis bahasa dan sastra, dan tenaga teknis perpustakaan serta tenaga perencanaan kebudayaan.

Sampai saat ini dana yang tersedia sudah terserap sebesar Rp 63.995.000,- atau sebesar 14,77 %.

Sebagai penjelasan uraian tersebut dapat dilihat pada (Bagan 10) grafik Anggaran pembangunan Subsektor Kebudayaan 1983/1984.

POSISI Kemajuan Anggaran Pembangunan 1983/1984
Sampai dengan September 1983.



88

■ = keadaan September 1983
□ = plafond anggaran 1983/84

E. LAIN-LAIN

Selain dari pada organisasi dan tata laksana, ketenagaan, perlengkapan, dan anggaran terdapat lain-lain, ialah kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan atau hal-hal yang ada relevansinya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. Persiapan penyelenggaraan HAPSAK Pancasila

Dalam rangka memperingati HAPSAK Pancasila 1983, Direktorat Jenderal Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Juni 1978 No.0197/U/1978, mulai bulan Juni '83 telah memulai dengan mengadakan persiapan penyelenggaraan Peringatan HAPSAK Pancasila 1983 dengan kegiatan-kegiatan berupa:

- a. Mengadakan surat menyurat lintas departemen maupun lintas instansi yang berkompeten.
- b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi yang terpadu dengan departemen-departemen maupun dengan instansi-instansi:
 - 1) Departemen Luar Negeri
 - 2) Departemen Dalam Negeri
 - 3) Departemen Penerangan
 - 4) Departemen Perdagangan
 - 5) Departemen Koperasi
 - 6) Departemen Agama
 - 7) Departemen Perindustrian
 - 8) Komando Garnizun Ibukota
 - 9) Kodak VII Metro Jaya
 - 10) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - 11) Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
 - 12) Pusat Sejarah ABRI
- c. Membentuk Panitia HAPSAK Pancasila 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.303/F1.1/F.83 guna menyelenggarakan HAPSAK Pancasila 1983, khususnya penyelenggaraan upacara puncak di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.

2. Hari Pendidikan Nasional

Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah telah ditetapkan tanggal 2 Mei dengan surat keputusan Presiden RI No.316 tahun 1959.

Dalam rangka penyelenggaraan HARDIKNAS 1983 Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berpartisipasi dalam bentuk menyuguhkan pameran yang meliputi bidang sejarah dan nilai tradisional, kesenian, kebahasaan, kepurbakalaan, kepercayaan, permuseuman, dan perpustakaan.

Selain dari pada itu telah diadakan pula kegiatan yang menjangkau pembinaan bahasa nasional berupa penyelenggaraan sayembara mengarang untuk guru-guru sekolah dasar dengan tujuan:

- a. Meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan secara baik dan benar di kalangan guru-guru sekolah dasar.
- b. Mengembangkan kegairahan membaca dan menulis di kalangan guru-guru sekolah dasar guna memperluas cakrawala pengetahuan.
- c. Memperoleh karangan bermutu dan bermanfaat untuk disebarluaskan sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca menjadi kebiasaan membaca di kalangan generasi muda, guru dan masyarakat umum.

Kegiatan di bidang peningkatan penghayatan seni/kesenian telah menjangkau para remaja, seniman, seniwati dan organisasi kesenian.

3. Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

Dalam memperingati hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-38, bidang kebudayaan telah berpartisipasi dengan ikut memeriahkan pelbagai kegiatan kesenian yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan puncak kegiatan malam kesenian kenegaraan.

4. Dharma Wanita

Dharma Wanita sebagai suatu wadah/organisasi yang menghimpun potensi wanita/karyawati dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan oleh Sub Unit Dharma Wanita di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan telah dilakukan kegiatan-kegiatan: mengadakan kursus ketrampilan, pendidikan kesejahteraan keluarga, kelompok belajar pendidikan dasar, mengadakan pasar murah, dan menyelenggarakan kantin di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

5. Kebudayaan dalam AMD Manunggal XII

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah ikut serta berpartisipasi dalam AMD Manunggal XII di Banda Aceh dengan kegiatan pameran peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu usaha meningkatkan dan memantapkan penghayatan masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya bangsa, mempertebal rasa dan sikap menghargai hasil cipta, karsa, dan karya leluhur serta turut ambil bagian yang positif dalam memelihara dan melindunginya.

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai penutup Laporan Tengah Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1983/1984 dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 1983/1984 antara bulan April sampai dengan September 1983 pada umumnya belum dapat mencapai sasaran, karena harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan SIAP. Di samping itu kegiatan anggaran murni 1983/1984 banyak yang dibintangi sedangkan proses pencairannya memerlukan waktu lama.
2. Pelbagai hambatan yang masih dijumpai merupakan masalah yang diharapkan akan mendapatkan perhatian bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
3. Semangat dan disiplin kerja perlu mendapat perhatian, sehingga semua sasaran kegiatan dapat tercapai dengan penyelenggaraan administrasi pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan secara tertib dan bersih.
4. Masalah yang menyangkut organisasi dan tata laksana, perlengkapan, ketenagaan serta anggaran diharapkan mampu memberikan masukan untuk pemecahannya dalam menyusun kebijaksanaan dalam Repelita IV.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan semangat dan disiplin kerja sehingga sasaran dapat tercapai tepat pada waktunya.
2. Perlu peningkatan kerja sama dengan pelbagai instansi yang relevan dalam menyelesaikan berbagai masalah.
3. Menyusun jadwal kerja secara ketat dan terarah baik untuk anggaran murni maupun SIAP.
4. Hasil pengolahan laporan tengah tahunan dapat dipetik manfaatnya terutama bagi unit utama dalam melaksanakan kebijaksanaan dalam masa-masa selanjutnya.

Perpustakaan
Jember